



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

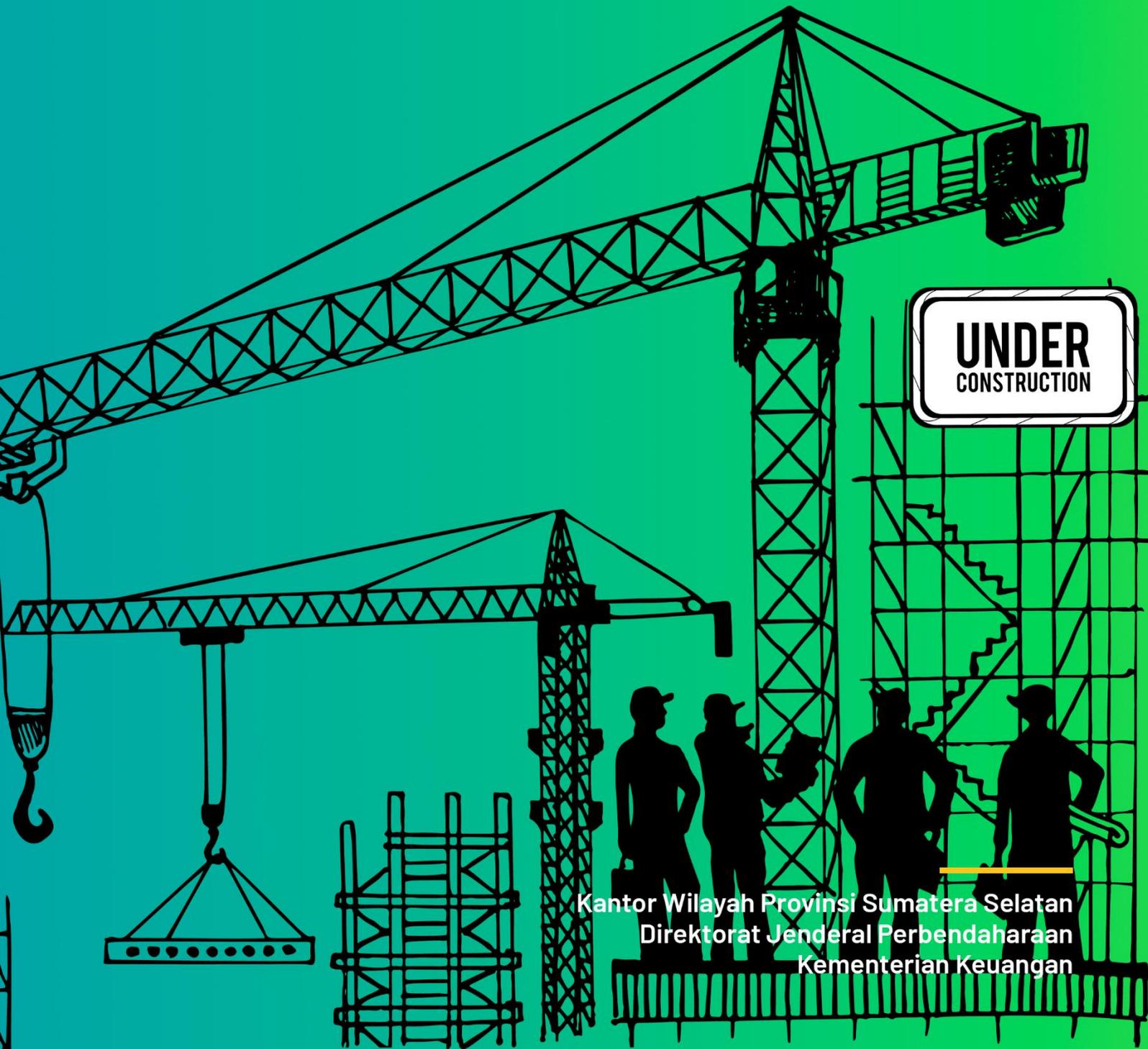
ISSN 3047-0994



Kajian Fiskal Regional

Provinsi Sumatera Selatan

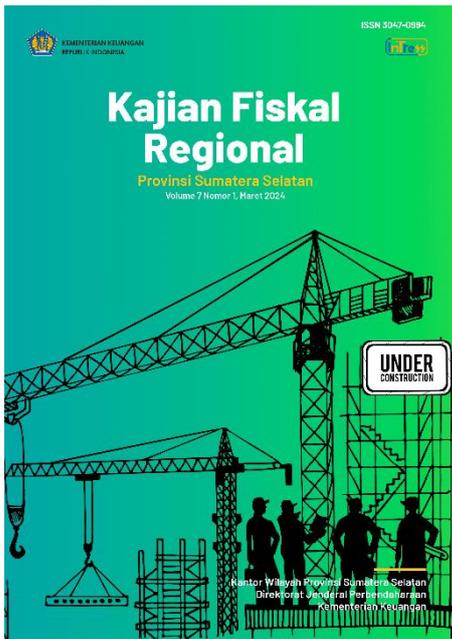
Volume 7 Nomor 1, Maret 2024



**UNDER
CONSTRUCTION**

Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

Kajian Fiskal Regional
Provinsi Sumatera Selatan
 Volume 7 Nomor 1, Maret 2024



Kajian Fiskal Regional
 diterbitkan oleh Kanwil
 Direktorat Jenderal
 Perbendaharaan Provinsi
 Sumsel, Kementerian
 Keuangan, dengan periode
 publikasi triwulanan

Diterbitkan oleh:

Kanwil DJPb Provinsi Sumsel

Pengarah:

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel

Penanggung Jawab:

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Reviewer dan Editor:

Yessi Marseilli

Kontributor:

Analisis Ekonomi Regional: Riedho Hizwar

Analisis Fiskal Regional: Jaka Trisna, Rizky Novrianto, Suhendi,
 M. Telly Anggra Syaputra, A'rsyil A'zim
 Yudho Bintoro Sandi, Suandi

Pengembangan Ekonomi Daerah: Suntari

Efektivitas Belanja Infrastruktur Konektivitas: Dr. Abdul Basyir

Desain dan Layout: Nur Rahma Kartika, Riedho Hizwar

Alamat Redaksi: Gedung Keuangan Negara Palembang Lantai II
 Jl. Kapten A. Rivai No. 2-4 Palembang

Situs Web: <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/>

Download KFR



Feedback



Kajian Fiskal Regional

Triwulan I Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2024.

KFR berperan untuk memberikan gambaran perkembangan implementasi kebijakan fiskal Pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024. Penyusunan KFR ini diharapkan dapat menjadi alat analisis, evaluasi dan menjadi media informasi yang bernilai strategis baik bagi Kementerian Keuangan maupun bagi para mitra kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyediakan data dan informasi dan telah berpartisipasi dalam penyelesaian KFR Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami berharap koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan KFR Provinsi Sumatera Selatan dapat terus berlanjut secara berkala di masa mendatang, guna mendukung kesinambungan implementasi kebijakan fiskal di Sumatera Selatan. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak, selalu kami harapkan, agar dapat menjadi perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kualitas dari hasil kajian yang dilakukan.

Harapan kami, semoga KFR Provinsi Sumatera Selatan Periode Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembuat dan pelaksanaan kebijakan di Sumatera Selatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan

ttd

Rahmadi Murwanto

DAFTAR ISI

Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan

Volume 7 Nomor 1, Maret 2024

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
DASHBOARD	viii
BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
A. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI	2
B. PERKEMBANGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN	4
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL.....	7
A. PELAKSANAAN APBN DI PROVINSI SUMSEL	8
B. PELAKSANAAN APBD DI PROVINSI SUMSEL	14
C. PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN	20
D. NERACA PEMERINTAH PUSAT-TINGKAT WILAYAH	21
BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH.....	24
A. PENDAHULUAN.....	25
B. KATEGORI UMKM	25
C. HASIL PROFILING UMKM	27
BAB IV EFEKTIVITAS BELANJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS	40
A. PERKEMBANGAN BELANJA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS.....	41
B. CAPAIAN INDIKATOR INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS.....	42
C. HUBUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAN KEMANTAPAN JALAN	46
D. HUBUNGAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Triwulan I Tahun 2024 ini disusun berdasarkan telaah makro belanja pemerintah di Sumsel sebagai bagian dari evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Melalui analisis atas efektivitas kebijakan fiskal terhadap pencapaian tujuan makroekonomi pada konteks regional ini dan sejalan dengan substansi penajaman KFR, diharapkan dapat mempertajam analisis korelasi/transmisi fiskal dalam perekonomian dan mempertajam analisis dampak/tematik atas peran fiskal dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumsel.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Sumsel periode 2024-2026 dengan prioritas: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta meningkatkan reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum serta delapan isu strategis yaitu pelaksanaan pemilu/pilkada serentak tahun 2024; peningkatan reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum, akselerasi penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting; peningkatan kualitas UMKM berbasis digital; peningkatan perekonomian dan nilai tambah sektor unggulan; percepatan realisasi proyek strategis di Sumsel; penyediaan infrastruktur ekonomi kerakyatan; serta pengelolaan lingkungan, mitigasi, dan penanganan bencana.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan, Sumsel menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, maupun institusional. Hal yang fundamental bagi perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien adalah kemampuan daerah dalam memetakan tantangan-tantangan daerah yang dihadapi baik dari sisi ekonomi, sosial-kependudukan, maupun tantangan lain di wilayahnya agar intervensi kebijakan fiskal melalui program prioritas daerah dapat mengatasi tantangan tersebut.

Beberapa target indikator makro ekonomi dan kesejahteraan Provinsi Sumatera Selatan yang harus dicapai di tahun 2024 untuk mendukung capaian nasional adalah tingkat kemiskinan 10,95%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,14%; pertumbuhan ekonomi 5,74%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,63; dan Rasio Gini 0,324.

Sampai dengan triwulan I 2024, indikator kesejahteraan yang sudah mencapai target adalah TPT yang sudah berada di angka 3,97%. Pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan I tahun 2024 mencapai 5,06%, sudah berada di atas pertumbuhan ekonomi regional Sumatera yang sebesar 4,24%, namun masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah daerah Sumsel dan sedikit di

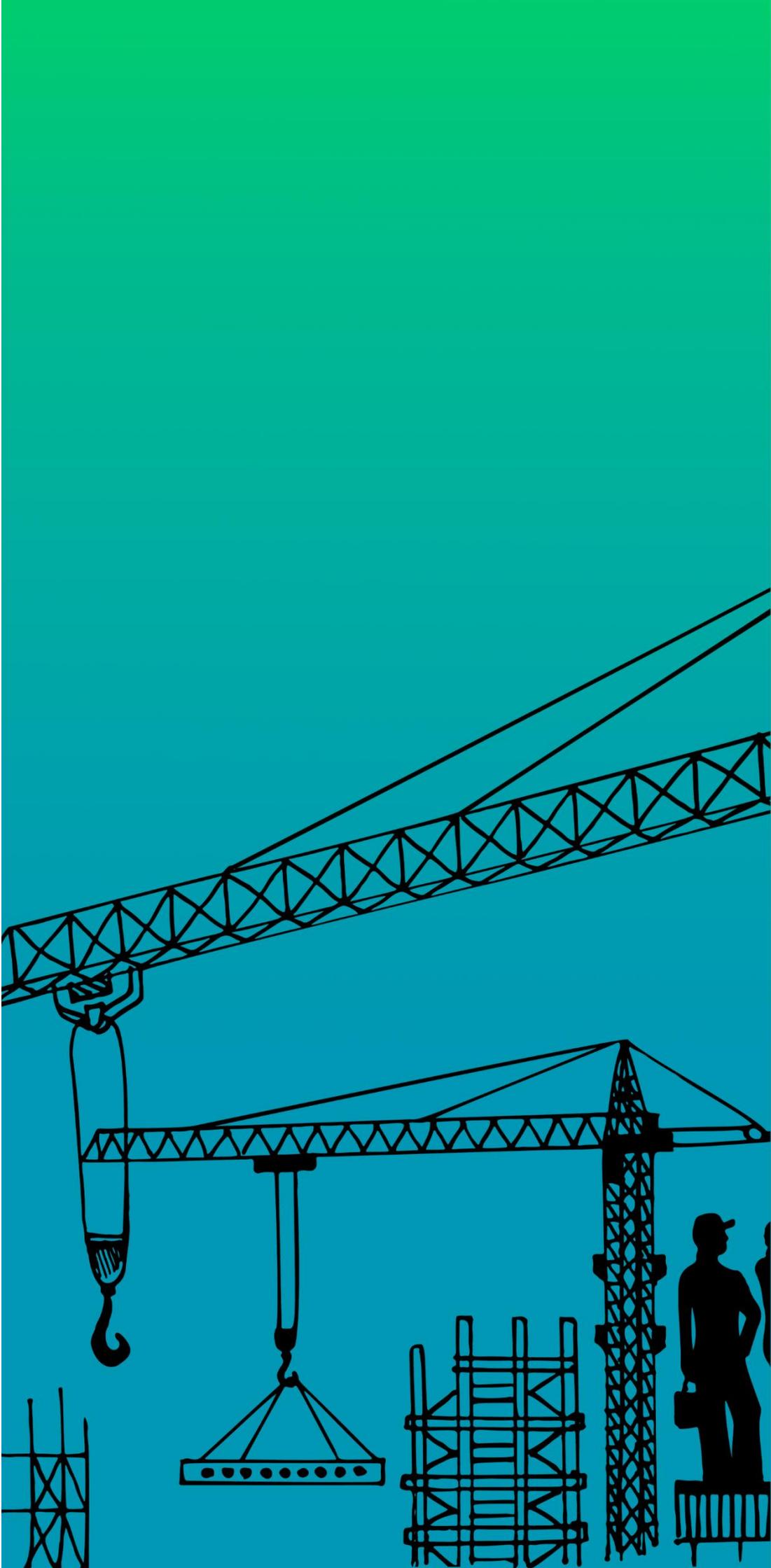
bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11% (yoy). Tiga sektor yang menjadi kontributor terbesar PDRB Sumsel adalah sektor Pertambangan, sektor Industri Pengolahan, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kondisi inflasi selama triwulan I pun masih terkendali walau berada di atas inflasi nasional, yaitu berada di angka 3,24%.

Dari sisi fiskal APBN, Pendapatan Negara pada triwulan I tahun 2024 tercapai 18,89% dari target atau tercatat sebesar Rp4,17 triliun, berkontraksi sebesar 1,55% (yoy), dan realisasi Belanja Negara tercatat 20% senilai Rp10,39 triliun, tumbuh 30,4% (yoy). Kinerja APBD juga cukup kuat di awal tahun dengan mencatatkan tren positif di triwulan I sehingga menjadi pondasi dalam menjaga perekonomian dan mendukung pembangunan di Sumsel, namun perlu merespon penurunan PAD dan ketergantungan terhadap dana transfer yang dapat berpengaruh pada kinerja periode selanjutnya.

Dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan sejalan dengan isu strategis daerah Sumsel, Kanwil DJPb dan KPPN melakukan pemberdayaan UMKM melalui berbagai upaya pendampingan melalui profiling dan identifikasi kebutuhan pemberdayaan UMKM. Terdapat tujuhbelas UMKM yang menjadi target pemberdayaan Kanwil DJPb Sumsel dan seluruhnya berskala ultra mikro serta bergerak di bidang usaha industri pengolahan.

Selanjutnya terkait efektivitas belanja pemerintah, Kanwil DJPb Sumsel melakukan analisis terkait infrastruktur konektivitas. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh belanja program infrastruktur konektivitas terhadap indikator kemantapan jalan/jembatan di Sumsel selama periode Januari 2021 s.d. Desember 2023. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa belanja program infrastruktur konektivitas memiliki tanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap indikator kemantapan jalan/jembatan di Sumsel. Selain itu, infrastruktur memiliki tanda positif dan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumsel serta tanda negatif dan pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan secara umum bahwa kinerja capaian realisasi belanja di bidang infrastruktur konektivitas cukup efektif dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja fiskal dan ekonomi Sumsel yang solid di triwulan I tahun 2024 ini perlu terus dikawal agar dapat terus meningkat pada periode selanjutnya sehingga seluruh target pembangunan dapat segera tercapai dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Sumsel.



DASHBOARD



Dashboard Ekonomi Regional

Indikator Makro Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi



Meskipun dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional, perekonomian Sumsel tetap tumbuh kuat dan stabil ditengah berbagai tantangan ekonomi yang mempengaruhi kinerja ekonomi nasional pada tahun 2024.

konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama pertumbuhan dari sisi pengeluaran. Dan sektor pertambangan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumsel dari sisi lapangan usaha.

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Inflasi

m - to - m **0,25%**
y - on - y **3,24%**

Ekonomi Sumsel Laju Inflasi Sumsel terkendali dan masih dalam rentang sasaran. Namun laju tersebut di atas laju inflasi nasional

Perkembangan Harga Pangan Sumsel

y - to - d



Beras Medium
-0,77%



Bawang Putih
5,79%



Bawang Merah
4,57%



Cabai Merah
18,98%



Daging Ayam
4,76%



Telur Ayam
9,83%

Sumber: Badan Pangan Nasional

Indikator Kesejahteraan

Selain kuat dan stabil, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan kualitas yang baik. Hal tersebut terlihat dari perkembangan indikator kesejahteraan Sumsel yang hingga triwulan I 2024 menunjukkan perkembangan yang terus membaik

Kemiskinan



Tingkat Kemiskinan Sumsel s.d. Maret 2023 sebesar:

11,78%



Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel s.d. Februari 2024 sebesar:

3,97%



Gini Rasio



Tingkat Ketimpangan di Sumsel s.d.Maret 2023 sebesar:

0,338



Nilai Tukar Petani



Nilai Tukar Petani di Sumsel s.d.Maret 2024 sebesar:

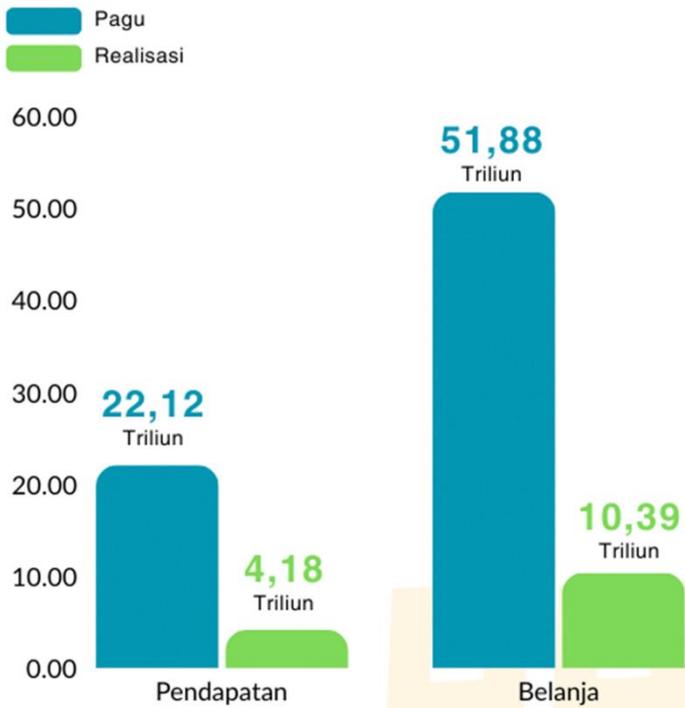
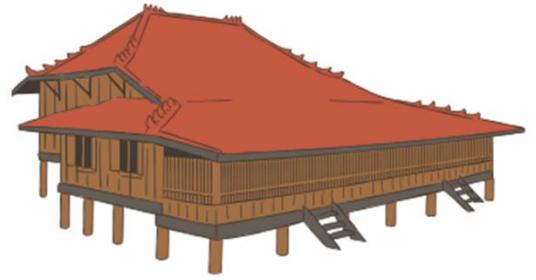
115,2



Sumber: BPS Provinsi Sumsel

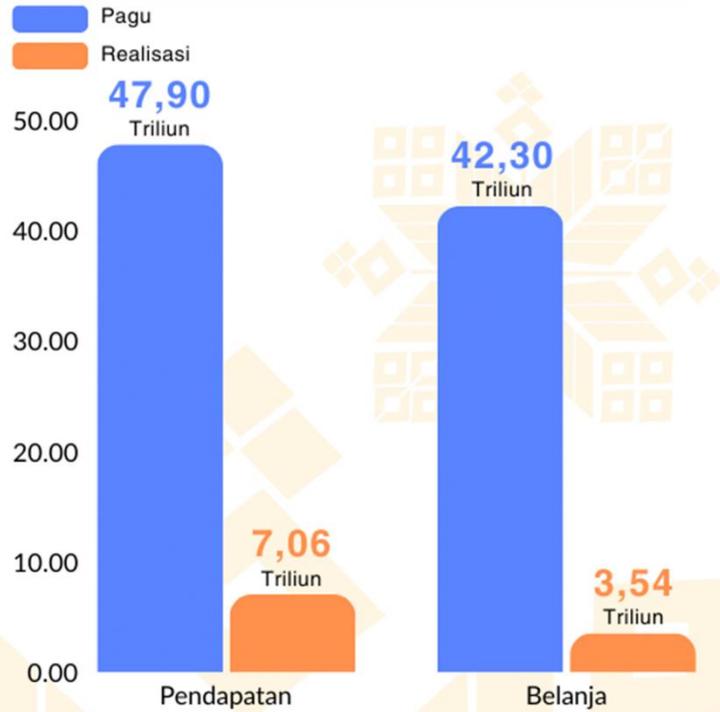
Kinerja Fiskal Regional

Triwulan 1 Tahun 2024



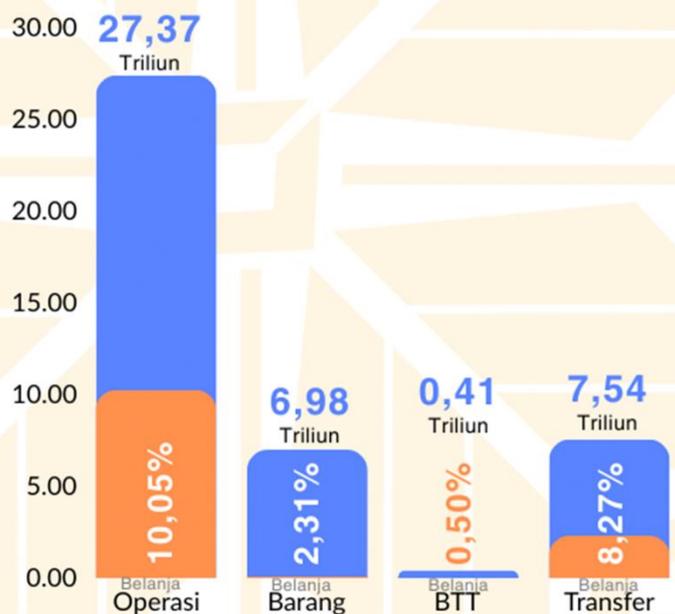
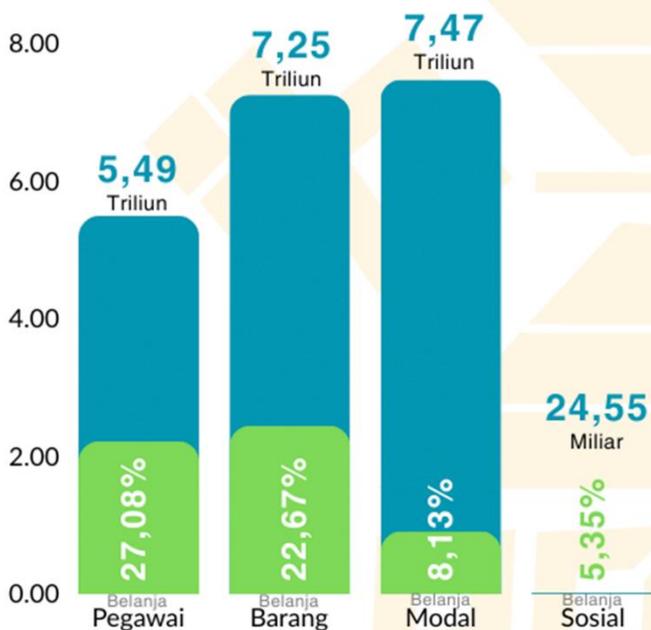
APBN

Sumber: Online Monitoring SPAN



APBD

Sumber: Dit. APK, DJPB



BAB I: ANALISIS EKONOMI REGIONAL



A. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

A.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sumsel tumbuh kuat dan stabil ditengah berbagai tantangan ekonomi yang mempengaruhi kinerja ekonomi nasional pada tahun 2024. Pada triwulan I 2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,06% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,95% (yoy). Meskipun pertumbuhan tersebut sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,11% (yoy), namun tetap berada di atas pertumbuhan ekonomi regional Sumatera yang sebesar 4,24% (yoy).

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (% , yoy)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Secara umum, positifnya kinerja perekonomian Sumsel pada triwulan I 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan momen Ramadhan, yang mendorong perekonomian dari sisi konsumsi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian ditengah berbagai tantangan ekonomi seperti perlambatan ekonomi global dan perubahan iklim, menjadi kunci dari ketahanan ekonomi Sumsel dan nasional.

A.1.1. PDRB Pengeluaran

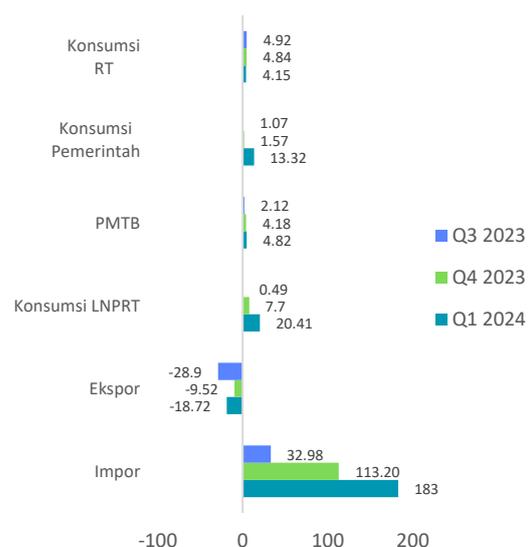
Pada awal tahun 2024, konsumsi rumah tangga di wilayah Sumsel tumbuh 4,15% (yoy). Daya beli masyarakat Sumsel terjaga dengan baik dengan kondisi inflasi yang terkendali. Konsumsi rumah tangga tersebut mendapatkan dorongan dari pemberian tunjangan hari raya (THR) yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya karena kebijakan pemberian besaran THR yang kembali

sebesar 100% dan peningkatan aktivitas mudik masyarakat pada momen Idul Fitri tahun 2024.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) wilayah Sumsel tumbuh *double digit* sebesar 13,32% (yoy). Konsumsi pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR 100% menjadi faktor pendorong utama konsumsi pemerintah pada triwulan I 2024. Kemudian pemerintah daerah juga melakukan pengeluaran pada komponen belanja tidak terduga yang dipergunakan untuk pengendalian inflasi dan penanggulangan bencana alam.

Investasi/PMTB Sumsel melanjutkan tren peningkatan dengan tumbuh sebesar 4,82% (yoy) pada triwulan I 2024. Positifnya tren kinerja investasi Sumsel tersebut didorong oleh aktivitas belanja modal pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang terkait dengan proyek strategis nasional seperti Jaringan Irigasi Lematang dan Bendungan Tiga Dihaji. Keyakinan investor juga terus terjaga terlihat dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masing-masing tumbuh 10,27% (yoy) dan 40,71% (yoy).

Grafik 1.2. Pertumbuhan Sisi Pengeluaran (% , yoy)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Konsumsi Lembaga NonProfit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) Sumsel tumbuh 20,41% (yoy). Masa kampanye dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 menjadi penyebab utama tingginya pertumbuhan LNPRT pada triwulan I 2024 tersebut.

Kinerja Ekspor berada dalam tren negatif dengan pertumbuhan sebesar -18,72% (yoy) pada triwulan I 2024. Pertumbuhan negatif tersebut dipengaruhi oleh tren penurunan harga komoditas unggulan Sumsel seperti Batubara dan CPO yang ternormalisasi sejak tahun lalu. Selain itu, permintaan atas komoditas karet dan pulp juga mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja Impor Sumsel triwulan I 2024 tumbuh tinggi mencapai 183% (yoy). Tingginya peningkatan impor Sumsel tersebut utamanya disumbang oleh impor barang modal yang mencapai 61,55% dari total impor triwulan I 2024. Tinggi impor barang modal tersebut dipengaruhi oleh aktivitas ekspansi oleh perusahaan PT. Pulp and Paper yang mengimpor komoditas berupa mesin dan peralatan mekanis, serta mesin dan perlengkapan listrik.

A.1.1. PDRB Lapangan Usaha

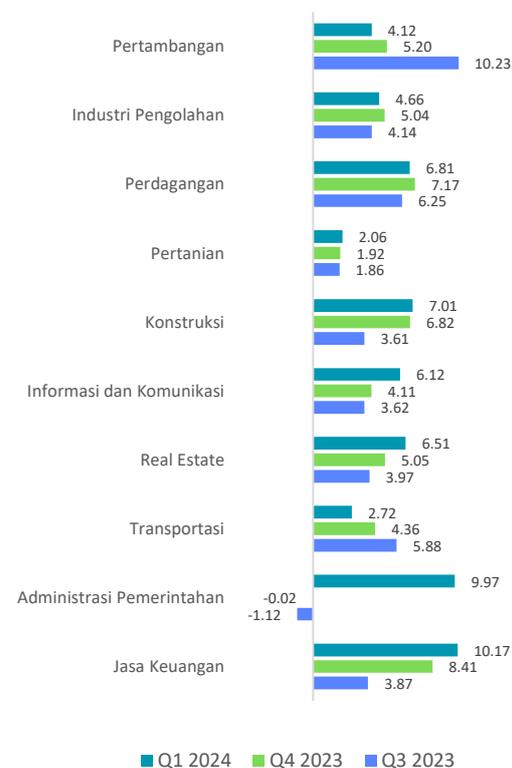
Sektor pertambangan yang merupakan kontributor terbesar dalam PDRB Sumsel tumbuh 4,12% (yoy) di triwulan I 2024, didorong oleh meningkatnya produksi batubara sebesar 6,43% (yoy). Peningkatan produksi tersebut disebabkan masih tingginya permintaan batubara baik dari pasar dalam negeri maupun luar negeri

Sektor Industri Pengolahan tumbuh 4,66% (yoy) dan Sektor Perdagangan tumbuh 6,81% di triwulan I 2024. Adanya pelaksanaan pemilu dan momen Ramadhan menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan permintaan pada kedua sektor tersebut.

Sektor pertanian pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,05% (yoy). Fenomena Elnino menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja sektor pertanian Sumsel di triwulan I 2024. Secara *year on year*, produksi padi Gabah Kering Giling turun 19,21%. Adapun yang menjadi pendorong pertumbuhan adalah

musim panen raya yang di beberapa kabupaten sudah mulai sejak Januari 2024, musim panen buah-buahan seperti duku dan durian, serta harga tandan buah segar kelapa sawit yang naik sehingga meningkatkan produksi.

Grafik 1.3. Pertumbuhan Sisi Lapangan Usaha (% yoy)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Sektor konstruksi dan real estate masing-masing tumbuh 7,01% (yoy) dan 6,51% (yoy) di triwulan I 2024. Aktivitas belanja modal pemerintah untuk pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) menjadi pengungkit kinerja sektor konstruksi. Sementara itu, adanya kebijakan pemberian insentif PPN Rumah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan sektor real estate.

Sektor transportasi mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,72% (yoy) di triwulan I 2024. Peningkatan mobilitas penduduk, khususnya pada momen Idul Fitri menjadi faktor utama yang mendorong kinerja sektor transportasi Sumsel.

Sektor Administrasi pemerintahan di triwulan I 2024 tumbuh sebesar 9,97% (yoy). Pertumbuhan tersebut utamanya didorong

oleh belanja pemerintah untuk pembayaran tunjangan hari raya dan belanja barang untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu.

A.2. Inflasi

Laju inflasi Sumsel terjaga dan berada dalam sasaran inflasi. Pada triwulan I 2024, inflasi Sumsel berada di angka 3,24% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2023 yang sebesar 4,92% (yoy). Namun demikian, inflasi Sumsel tersebut masih berada di atas inflasi nasional yang sebesar 3,05% (yoy). Momen bulan Ramadhan menjadi faktor utama yang mendorong laju inflasi Sumsel di triwulan I 2024.

Grafik 1.4. Inflasi Sumsel (% , yoy)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Penyumbang utama inflasi Sumsel di triwulan I 2024 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil inflasi sebesar 2,42%. Komoditas penyumbang utama inflasi Sumsel secara *year on year* adalah Beras, Daging Ayam Ras, Cabai Merah, Tarif Air Minum PDAM, dan Emas Perhiasan.

B. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

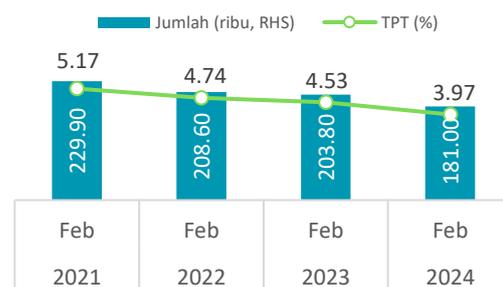
B.1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Sumsel mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan ekonomi yang terus positif. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumsel per Februari 2024 berada di angka 3,97% (yoy), turun dari kondisi Februari 2024 yang sebesar 4,53% (yoy). Berdasarkan jumlah, aktivitas perekonomian Sumsel dalam satu tahun tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 85,2 ribu orang dan pengangguran berkurang sebanyak 22,8 ribu orang.

Sektor Pertanian dan Akomodasi Makan Minum menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja

terbesar. Selama periode Februari 2023 s.d. Februari 2024, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 76 ribu orang, terutama peningkatan pada pekerja keluarga yang didominasi pekerja dengan pendidikan SD ke bawah. Sektor makan minum menyerap sebanyak 39,3 ribu orang, dengan peningkatan pada pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMA sederajat.

Grafik 1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel (% , yoy)



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Sektor Jasa Profesional & Perusahaan dan sektor perdagangan menjadi sektor yang mengalami penurunan tenaga kerja terbesar. Kedua sektor tersebut secara total mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 65 ribu orang. Sektor Jasa Profesional & Perusahaan didominasi pekerja berstatus buruh dengan mayoritas pekerja berpendidikan SMA derajat.

B.2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan Sumsel mengalami tren perbaikan dari tahun ke tahun. Per Maret 2023, kemiskinan Sumsel berada di angka 11,78%, turun dari September 2023 yang sebesar 11,95%.

Grafik 1.6. Tingkat Kemiskinan Sumsel



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Perbaikan kondisi kemiskinan Sumsel juga terlihat dari Indeks Kedalaman (P1), yang pada Maret 2023 berada di indeks 1,724, turun dari September 2022 yang sebesar 1,789. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk miskin pasca dampak pandemi Covid-19. Namun, Indeks Keparahan (P2) Sumsel mengalami peningkatan dari 0,386 pada September 2022 menjadi 0,393 di Maret 2023. Peningkatan tersebut menjadi indikasi bahwa terdapat pelebaran ketimpangan antar penduduk miskin di Sumsel.

Grafik 1.7. Gini Ratio Sumsel



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Sementara itu, kondisi ketimpangan Sumsel per Maret 2023 mengalami pelebaran jika dibandingkan kondisi per September 2022. Gini Ratio Sumsel pada Maret 2023 meningkat menjadi 0,338 dari sebelumnya 0,330 pada September 2022. Pelebaran ketimpangan tersebut terjadi di wilayah perkotaan, sementara wilayah pedesaan mengalami penurunan ketimpangan.

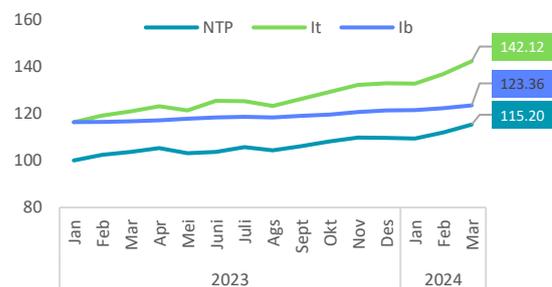
B.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel secara umum menunjukkan tren peningkatan. Per Maret 2024, NTP Sumsel tercatat di angka 115,20, meningkat 11,19% (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan Indeks Terima Petani sebesar 17,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Bayar Petani yang sebesar 5,67% (yoy).

Peningkatan NTP Sumsel ditopang oleh subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) dan Tanaman Pangan (NTPP). Subsektor NTPR meningkat sebesar 13% (yoy) dipengaruhi oleh

perkembangan komoditas karet, kopi, kakao, lada, dan kelapa.

Grafik 1.8. NTP Sumsel



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Kinerja subsektor NTPP dipengaruhi oleh perkembangan komoditas gabah, ketela pohon, jagung, ketela rambat, dan kacang kedelai.

B.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel secara gradual terus mengalami peningkatan sejalan dengan positifnya perkembangan kinerja perekonomian Sumsel. IPM Sumsel tahun 2023 berada diangka 73,18, berada dalam kategori tinggi, meningkat 0,96% dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, IPM Sumsel masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Nasional yang sebesar 74,29.

Grafik 1.9. IPM Sumsel



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Dari dimensi pembentuk IPM, peningkatan terjadi disemua dimensi. Kenaikan tertinggi pada dimensi Pengeluaran Perkapita yang meningkat 3,26% (yoy), diikuti Rata-rata Lama Sekolah 1,55% (yoy), Angka Harapan Hidup 0,38% (yoy), dan Harapan Lama Sekolah meningkat 0,63% (yoy).

Box 1

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Sumsel

Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Sumsel (11,78%) berada di atas angka nasional yang berada di 9,36% pada Maret 2023. Sumsel termasuk dalam 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Selain itu, tren kemiskinan Sumsel dalam 5 tahun terakhir selalu berada di atas angka nasional, serta selalu lebih tinggi di wilayah pedesaan dibandingkan di perkotaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Dana Desa terbukti secara empiris memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) menyimpulkan bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Sigit & Kosasih (2020) menemukan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Dengan harapan dapat diidentifikasi sejauh mana peningkatan IPM dan Dana Desa berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh IPM dan Dana Desa terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menggunakan data sekunder dari 14 kabupaten/kota selama periode 2018-2022, studi ini menerapkan analisis regresi berganda data panel dengan model random effect. Hasil menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, di mana setiap peningkatan IPM satu maka mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 1,295700. Sebaliknya, Dana Desa menunjukkan pengaruh signifikan dan positif, di mana setiap peningkatan Dana Desa satu unit meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 5,482548.

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa secara simultan IPM dan dana desa berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan. Berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian dan peningkatan IPM perlu terus dilaksanakan karena terbukti secara parsial berpengaruh dalam penurunan kemiskinan di Sumsel. Sementara itu, untuk dapat menciptakan pengaruh penurunan pada kemiskinan, penyaluran dana desa di Sumsel perlu untuk dievaluasi dan dikawal oleh berbagai pihak terkait dengan pengalokasian dan penggunaan dana desa yang langsung menargetkan terhadap penurunan kemiskinan di Sumsel. Selain itu, perlunya peningkatan inovasi dan sinergi baik dari unsur masyarakat desa, aparat fungsional pemda, BPKP, dan BPK dalam melaksanakan pengawasan penggunaan dana desa sehingga tidak terjadi korupsi dan penyelewengan dana desa. Selain itu, lokus target penurunan kemiskinan di wilayah Sumsel perlu diarahkan utamanya ke pemda Kab. OKI dimana tanpa adanya dukungan IPM dan Dana Desa memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi.

BAB II: ANALISIS FISKAL REGIONAL



A. Pelaksanaan APBN

APBN sebagai instrumen pemerintah pusat menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi di Sumatera Selatan. Prioritas APBN tahun 2024 di Sumatera Selatan difokuskan untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu. Terlihat pada pagu belanja pemerintah pusat meningkat di tahun 2024 sebesar 19,20% (*year on year*), tahun sebelumnya teralokasi sebesar Rp16,97 triliun menjadi Rp20,23 triliun. Peningkatan alokasi terbesar terdapat pada pagu belanja modal sebesar 50,10% (*year on year*). Sedangkan pada alokasi transfer ke daerah (TKD) mengalami kontraksi di tahun 2024 sebesar -6,32% (*year on year*), hal tersebut dikarenakan penurunan alokasi pagu DAK Fisik.

Kinerja APBN di Sumatera Selatan telah *ontrack* di awal tahun. Realisasi belanja negara

mengalami pertumbuhan positif sebesar 30,37% (*year on year*), kinerja positif tersebut terlihat dari realisasi belanja pemerintah pusat pada hampir di semua jenis belanja. Pada penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 17,60% (*year on year*). Di sisi realisasi penerimaan negara di triwulan I 2024 mengalami sedikit terkontraksi sebesar -1,55% (*year on year*). Hal tersebut didorong oleh kontraksi yang terjadi pada penerimaan pajak dan bea cukai. Penerimaan pajak dikarenakan adanya peningkatan restitusi, sedangkan penerimaan bea cukai dipengaruhi oleh harga komoditas kelapa sawit (CPO). Pertumbuhan positif terjadi pada kinerja PNBP yang didorong oleh peningkatan penerimaan PNBP BLU.

Tabel II.1. Laporan Realisasi APBN di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2024

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Negara	19,914.83	4,245.48	21.32%	22,128.79	4,179.73	18.89%	-1.55%
Perpajakan	17,827.38	3,521.60	19.75%	19,909.78	3,396.90	17.06%	-3.54%
Penerimaan Pajak	17,552.61	3,436.84	19.58%	19,530.94	3,331.98	17.1%	-3.05%
Bea Cukai	274.76	84.76	30.85%	378.84	64.92	17.1%	-23.41%
PNBP	2,087.45	723.88	34.68%	2,219.01	782.83	35.28%	8.14%
Belanja Negara	50,756.56	7,974.56	15.71%	51,882.85	10,396.04	20.0%	30.37%
Belanja Pemerintah Pusat	16,976.88	2,314.42	13.63%	20,236.84	3,739.48	18.48%	61.57%
Belanja Pegawai	5,245.76	1,016.79	19.38%	5,490.02	1,486.83	27.08%	46.23%
Belanja Barang	6,728.89	978.84	14.55%	7,251.81	1,644.23	22.67%	67.98%
Belanja Modal	4,976.91	317.16	6.37%	7,470.46	607.11	8.13%	91.42%
Belanja Bantuan Sosial	25.32	1.63	6.43%	24.55	1.31	5.35%	-19.24%
Transfer ke Daerah	33,779.68	5,660.14	16.76%	31,646.02	6,656.56	21.03%	17.60%
Dana Bagi Hasil	13,042.49	1,355.47	10.39%	9,969.62	1,467.03	14.71%	8.23%
Dana Alokasi Umum	12,254.41	2,999.48	24.48%	13,400.40	3,448.90	25.74%	14.98%
DAK Fisik	1,568.36	-	0.00%	1,430.07	-	0.00%	-
DAK Non Fisik	4,171.97	850.31	20.38%	4,251.07	985.58	23.18%	15.91%
Dana Insentif Daerah	245.68	-	0.00%	73.48	-	0.00%	-
Dana Desa	2,496.78	454.88	18.22%	2,521.37	755.06	29.95%	65.99%
Hibah ke Daerah	85.53	0.73	0.00%	9.57	-	0.00%	-100.00%
SURPLUS / DEFISIT	(30,841.73)	(3,729.08)	12.09%	(29,754.07)	(6,216.32)	20.89%	66.70%

Sumber: OMSPAN, Simtrada, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (2024, diolah)

A.1 Pendapatan Negara

Pendapatan negara Sumatera Selatan di triwulan I 2024 sedikit berkontraksi. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp4,17 Triliun atau 18,89% dari target. Pendapatan negara berkontraksi sebesar -1,55% (year on year) jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam periode yang sama tahun lalu.

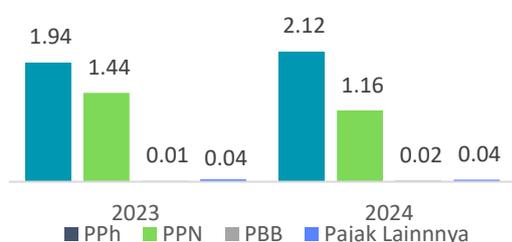
Share pendapatan negara terbesar ditopang dari penerimaan pajak dan PNBP. Penerimaan pajak mengalami sedikit kontraksi dan PNBP menunjukkan pertumbuhan positif (year on year). Untuk penerimaan bea cukai mengalami kontraksi cukup besar di triwulan I 2024.

A.1.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak di triwulan I 2024 mengalami kontraksi sebesar -3,05% (y.o.y) dipengaruhi oleh peningkatan restitusi. Penerimaan pajak di Sumatera Selatan s.d Maret 2024 terealisasi sebesar Rp3,33 triliun atau mencapai 17,1% dari target. Di luar dari restitusi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 5,9% (year on year).

Berdasarkan penerimaan per jenis pajak, kontraksi terjadi pada jenis Pajak Pertambahan Nilai sebesar -19,7% (year on year). Hal tersebut dikarenakan penurunan signifikan pada harga komoditas dan adanya peningkatan restitusi. Pertumbuhan positif terjadi pada jenis Pajak Penghasilan sebesar 9,1% (year on year) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar 36,2% (year on year). Pertumbuhan jenis pajak tersebut didukung oleh baiknya aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan.

Grafik 2.1. Realisasi Per Jenis Pajak (Rp triliun)

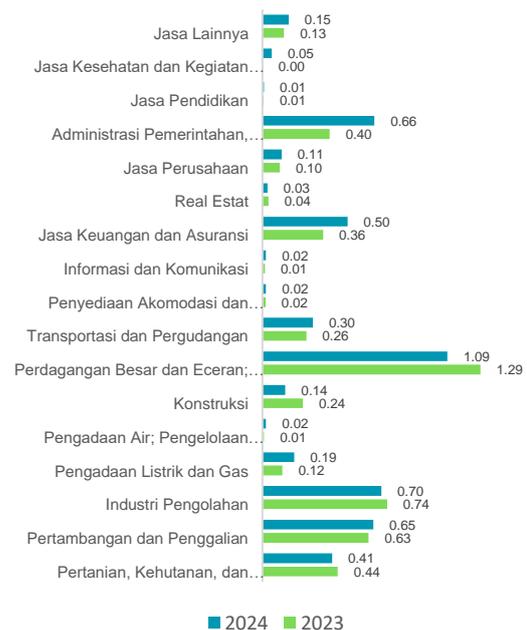


Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel (2024, diolah)

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak di Sumatera Selatan. Share penerimaan pajak dari sektor perdagangan

besar dan eceran sebesar 21,56% dari total penerimaan pajak. Namun penerimaan pajak di sektor perdagangan di triwulan I 2024 mengalami kontraksi sebesar -15,14% (year on year). Kontraksi dimaksud dipengaruhi oleh peningkatan restitusi pada perusahaan perdagangan besar bahan bakar padat dan perdagangan besar balas jasa fee, serta penurunan pembayaran PPh 23 atas sewa aktiva.

Grafik 2.2. Realisasi Per Jenis Pajak Per Lapangan Usaha (Rp triliun)



Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel (2024, diolah)

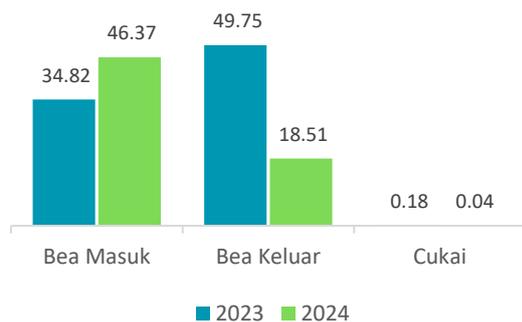
Dari grafik diatas terlihat jenis sektor yang menunjukkan pertumbuhan terbesar, adalah sektor administrasi pemerintahan sebesar 66,80% (year on year). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi pembayaran PPN DN atas belanja modal dengan kontribusi terbesar dari Pemerintahan Bidang Perumahan dan Konstruksi.

A.1.2 Penerimaan Bea Cukai

Penerimaan bea dan cukai di Sumatera Selatan berkontraksi -23,41% (y.o.y) dipengaruhi oleh harga komoditas. Secara total penerimaan bea dan cukai di triwulan I 2024 sudah mencapai Rp64,92 Milyar atau 17,1% dari target. Penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp46,37 Milyar, tumbuh positif sebesar 33,29% (year on year). Pertumbuhan positif bea masuk dikarenakan meningkatnya impor beras yang

dilakukan oleh Bulog. Penerimaan bea keluar terealisasi sebesar Rp18,51 Milyar, tekontraksi sebesar -62,80% (*year on year*). Penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh turunnya volume ekspor dan harga komoditas CPO yang termoderasi. Untuk penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp 35, 36 juta. Penerimaan cukai berasal dari tindakan *ultimum remidium* atas peredaran rokok ilegal.

Grafik 2.3. Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai (Rp triliun)



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim(2024, diolah)

Komoditi unggulan ekspor Sumatera Selatan berupa Batubara, Pulp dan Karet. Komoditi unggulan impor Sumatera selatan berupa mesin dan generator.

A.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pulihnya aktivitas masyarakat mendorong pertumbuhan positif PNBPN di Sumatera Selatan. PNBPN di Sumatera Selatan tumbuh 8,14% (*year on year*), terealisasi sebesar Rp 0,78 Triliun (35,28% dari target).

Grafik 2.4. Realisasi PNBPN (Rp triliun)



Sumber: OMSPAN (2024, diolah)

Dari graifk diatas, terlihat bahwa share terbesar PNBPN di Sumatera Selatan berasal dari PNBPN Badan Layanan Umum (BLU). PNBPN BLU berasal dari imbal balik dari masyarakat atas layanan

jasa kesehatan, pendidikan dan jasa lainnya yang dilakukan oleh pemerintah.

Realisasi PNBPN Lainnya s.d triwulan I 2024 sebesar Rp0,25 Triliun, tekontraksi -6,34% (*year on year*). PNBPN lainnya didorong oleh pendapatan jasa Pelabuhan dikarenakan kegiatan seperti labuh, tambat, jasa barang, sewa perairan, jasa bongkar muat dan jasa *Ship To Shore* (STS), serta kunjungan kapal.

Realisasi PNBPN BLU s.d triwulan I 2024 terealisasi sebesar Rp0,53 Triliun, tumbuh positif 16,54% (*year on year*). PNBPN BLU terbesar di dorong oleh pendapatan jasa layanan pendidikan dikarenakan adanya Pembayaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan terdapat penambahan pendapatan dari BLU baru yaitu Politeknik Kesehatan Palembang.

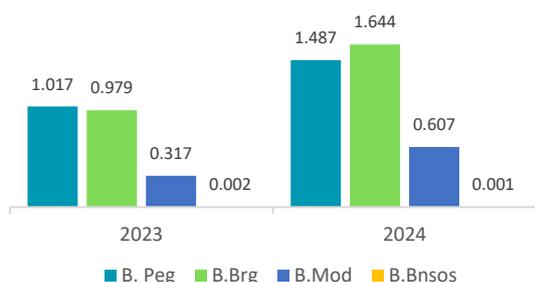
A.2 Belanja Negara

Belanja negara di Triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif. Realisasi belanja negara sebesar Rp10,40 Triliun atau 20% dari alokasi belanja. Kinerja positif ditunjukkan dari realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Selatan yang tumbuh sebesar 61,57% (*year on year*) dan penyaluran Transfer ke Daerah tumbuh sebesar 17,60% (*year on year*). Hal tersebut didorong oleh percepatan satuan kerja dalam mengeksekusi belanja dan percepatan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran transfer ke daerah.

A.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal menunjukkan kinerja yang positif, sedangkan Belanja Bantuan Sosial tekontraksi. Pemerintah Pusat dengan belanja negara menjalankan fungsi APBN untuk memberikan pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan pelayanan umum kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Realisasi belanja pemerintah pusat di triwulan I 2024 sebesar Rp3,73 Triliun atau 18,48% dari pagu. Kinerja belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan sebesar 61,57% (*year on year*). Secara umum kinerja belanja tersebut didorong oleh percepatan kinerja satker KL dalam mengeksekusi belanja.

Grafik 2.5. Realisasi Per Jenis Belanja (Rp triliun)



Sumber: OMSPAN (2024, diolah)

Kinerja belanja pegawai tumbuh positif dikarenakan pembayaran THR gaji dan tunjangan serta kebijakan kenaikan gaji PNS dan PPNPN. Realisasi belanja pegawai di triwulan I mencapai Rp1,48 Triliun atau 27,08% dari pagu. Kinerja belanja pegawai mengalami pertumbuhan positif sebesar 46,23% (*year on year*).

Kinerja belanja barang tumbuh positif didorong oleh kegiatan pelaksanaan pemilu di 2024. Realisasi belanja barang di triwulan I sebesar Rp1,64 Triliun atau 22,67% dari pagu. Belanja barang mengalami pertumbuhan positif sebesar 67,98% (*year on year*). Pertumbuhan realisasi belanja barang terbesar terdapat pada satuan kerja KPU dan Bawaslu.

Belanja Modal tumbuh positif didorong oleh pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Realisasi belanja modal di triwulan I 2024 sebesar Rp0,60 Triliun atau 8,13% dari pagu. Kinerja belanja modal tumbuh sebesar 91,42% (*year on year*), di dorong oleh realisasi satuan kerja PUPR untuk Proyek Strategis Nasional seperti pembangunan jaringan Daerah Irigasi Lematang dan Bendungan Tiga Dihaji.

Belanja bantuan sosial mengalami kontraksi dikarenakan belum salurnya KIP Kuliah. Realisasi belanja bantuan sosial di triwulan I 2024 sebesar Rp1,31 Miliar atau 5,35% dari pagu. Kinerja belanja bantuan sosial mengalami kontraksi sebesar -19,24% (*year on year*) didorong oleh penyaluran KIP Kuliah untuk mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan dilaksanakan pada triwulan II 2024.

Realisasi belanja pemerintah pusat di triwulan I 2024 terbesar di Kementerian PUPR. Realisasi Kementerian PUPR di triwulan I mencapai Rp0,62 Triliun atau sebesar 9,27% dari pagu. Dilihat dari persentase realisasi, tertinggi

terdapat pada Kementerian Agama sebesar 26,94% dari pagu.

Tabel 2.1. Pagu dan Realisasi KL Terbesar (Rp miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PAGU	REAL	% REAL
Kementerian PUPR	6.723,58	622,99	9,27%
POLRI	1.896,96	158,00	8,33%
Kementerian Pertahanan	1.836,53	487,14	26,53%
Kementerian Agama	1.787,13	481,36	26,94%
Kementerian Pendidikan Nasional	1.400,33	282,95	20,21%
Kementerian Kesehatan	1.315,68	175,59	13,35%
Kementerian Perhubungan	1.271,94	265,39	20,87%

Sumber: OMSPAN (2024, diolah)

Realisasi pagu K/L terbesar di peruntukkan untuk:

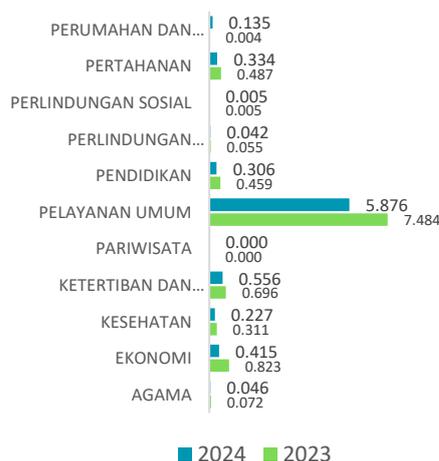
1. Kementerian PUPR, dengan alokasi pagu terbesar a.l program Program Ketahanan Sumber Daya Air sebesar Rp 4.182,4 miliar, serta program Infrastruktur Konektivitas dengan alokasi sebesar Rp2.417,57 miliar.
2. POLRI, dengan alokasi pagu terbesar a.l Program dukungan manajemen dialokasikan sebesar Rp 962,06 miliar untuk kegiatan operasional satker di lingkup Polda Sumsel, serta Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp418,63 miliar.
3. Kemenhan, dengan alokasi pagu terbesar a.l Program Dukungan Manajemen dialokasikan sebesar Rp 1.634,41 miliar untuk operasional satker TNI di Sumsel (termasuk gaji), selain itu terdapat Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit yang dialokasikan sebesar Rp 169,13 miliar didalamnya terdapat layanan kesehatan pada Rumkit Dr Noesmir Baturaja dan Rumkit Dr. A.K Gani Palembang.
4. Kemendiknas, dengan alokasi pagu terbesar a.l Program Pendidikan Tinggi dialokasikan Rp 651,94 miliar yang terdapat BOPTN dan Tunjangan Profesi Dosen Non PNS. Alokasi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 421,31 miliar sebagai operasional satker di Kemendiknas.
5. Kemenag, dengan alokasi pagu terbesar a.l Program Dukungan Manajemen sebesar

Rp 983,01 miliar, serta Program Pendidikan Tinggi dialokasikan Rp 232,03 miliar.

6. Kemenkes, dengan alokasi pagu terbesar a.l. Program Pelayanan JKN dan Kesehatan Masyarakat dialokasikan Rp 986 miliar yang salah satunya untuk layanan rumah sakit pemerintah pada RS Moehammad Hoesin dan RS Rivai Abdullah Palembang. Program Program Dukungan Manajemen dialokasikan Rp 253,02 miliar untuk belanja operasional satuan kerja.
7. Kemenhub, dengan alokasi pagu terbesar a.l. Program Konektivitas Infrastruktur dialokasikan Rp 1.555,2 miliar, serta Program Program Dukungan Manajemen yang dialokasikan sebesar Rp 223,38 miliar.

Realisasi belanja fungsi pelayanan umum terbesar untuk triwulan I 2024. Realisasi belanja fungsi pelayanan umum memberikan *share* sebesar 59% kepada seluruh belanja total. Dari kinerja pertumbuhan, tertinggi terdapat pada realisasi belanja fungsi ekonomi sebesar 98,18% (*year on year*). Kinerja terendah terdapat pada realisasi belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar -97,07% (*year on year*).

Grafik 2.6. Realisasi Per Fungsi Belanja (Rp triliun)



Sumber: Sintesa (2024, diolah)

Kinerja tersebut di dorong oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Percepatan realisasi belanja modal pada satuan kerja PUPR khususnya untuk pembangunan dan rehabilitasi beberapa daerah irigasi dan pembangunan proyek

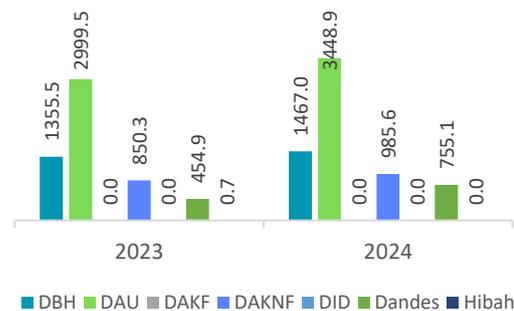
strategis nasional seperti Bendungan Tiga Di Haji mendorong realisasi belanja di fungsi ekonomi;

2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pemilu dan kebijakan pembayaran THR gaji dan tunjkin di triwulan I 2024 mendorong realisasi belanja di fungsi pelayanan umum;

A.2.2 Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer Ke Daerah tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Di triwulan I 2024, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,65 Triliun atau 21,03% dari pagu. Kinerja penyaluran TKD di Sumatera Selatan tumbuh positif sebesar 17,60% (*year on year*). Didorong oleh percepatan pemerintah daerah di Sumatera Selatan dalam memenuhi dokumen syarat penyaluran.

Grafik 2.7. Realisasi Per Jenis TKD (Rp miliar)



Sumber: OMSPAN (2024, diolah)

Dari grafik diatas terlihat beberapa jenis TKD sudah salur di Triwulan I 2024, yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Jenis TKD yang belum salur yaitu DAK Fisik, Dana Insentif Daerah dan Hibah ke Daerah.

Penyaluran DBH mencapai Rp1,46 triliun atau 14,71% dari pagu. Capaian tersebut terutama dikontribusikan oleh peningkatan realisasi DBH SDA Minerba sampai dengan Maret 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyaluran DAU mencapai Rp3,44 triliun atau 25,74% dari pagu. Capaian tersebut terutama dikontribusikan oleh peningkatan DAU Block Grant (yang tidak ditentukan penggunaannya), serta beberapa DAU Specific Grant yang telah salur pada sampai dengan Maret 2024 seperti DAU bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan

umum, dan pendanaan kelurahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyaluran DAK Non Fisik mencapai Rp985,58 miliar atau 23,18% dari pagu. Capaian tersebut dikontribusikan terutama dari penyaluran dana BOSP tahap I yang terdiri dari dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan yang telah dilakukan pada Januari, penyaluran BOK Puskesmas dan BOK Dinas tahap I pada Februari, serta penyaluran sebagian DAK Nonfisik jenis lainnya untuk tahap I.

Penyaluran Dana Desa akseleratif dengan mencatatkan Rp755,06 Miliar hingga Maret 2024, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan terjadi peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran dibandingkan tahun sebelumnya.

DAK Fisik belum dilakukan penyaluran hingga Maret 2024 karena masih menunggu juknis penyaluran DAK Fisik 2024.

Realisasi Hibah di awal tahun jarang terjadi kecuali terdapat tagihan tahun sebelumnya yang dibayarkan pada 2024. Hal ini disebabkan penyaluran hibah kepada daerah menggunakan mekanisme reimbursement berdasarkan progress penyelesaian pekerjaan di daerah.

A.2.3 Surplus/Defisit

Defisit APBN di Sumatera Selatan di triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 66,70% (*year on year*). Hal tersebut dikarenakan akselerasi belanja pemerintah pusat dan penyaluran transfer ke daerah di Sumatera Selatan.

A.2.4 Prognosis Realisasi APBN

Prognosa pendapatan negara di Sumatera Selatan akan melewati target di akhir tahun 2024. Berdasarkan hasil prognosa realisasi pendapatan negara *ontrack* tercapai di setiap triwulannya. Dari masing-masing jenis pendapatan negara, pendapatan pajak yang di prognosa melampaui target yaitu 101,66%. Hal tersebut di dorong oleh pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang menunjukkan tren optimis dan kecenderungan setoran pajak yang akan menumpuk di akhir tahun. Untuk penerimaan Pajak dan Bea Cukai di prognosa tercapai target 100% s.d akhir tahun 2024.

Pendapatan bea masuk di dorong oleh importasi barang modal dan komoditas beras dari impor bulog yang diperkirakan akan terjadi sampai dengan akhir tahun.

Untuk PNBP di prognosa mengalami peningkatan karena perbaikan tata kelola pada BLU Rumah Sakit untuk percepatan *claim* tagihan BPJS dan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional untuk dapat menaikkan UKT (Uang Kuliah Tunggal).

Kinerja Belanja Negara di prognosa ontrack sampai dengan akhir tahun 2024. Belanja Pemerintah Pusat di prognosa akan mencapai 96,45%, didorong oleh percepatan yang dilakukan oleh satuan kerja KL di Sumatera Selatan. Hal tersebut di dorong akan dibayarkan gaji dan tunjangan 13 di bulan Juni 2023, pembayaran beasiswa bidikmisi/KIP Kuliah yang akan dibayarkan pada triwulan II dan IV, realisasi pembangunan proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Simpang Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, Jaringan Daerah Irigasi Lematang dan Jaringan Daerah Irigasi Lempuing.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah di prognosa akan mencapai 96,91% di akhir tahun 2024. Hal tersebut didorong oleh kerjasama antara KPPN dengan Pemda agar dapat memenuhi syarat salur penyaluran TKD sehingga tidak terjadi gagal salur.

Tabel 2.2. Proyeksi Realisasi APBN Sumsel 2024

Akun (%)	s.d. Q2 2024	s.d. Q3 2024	s.d. Q4 2024
	%	%	%
Pendapatan Negara	41.29%	70.70%	101.46%
Penerimaan Pajak	39.89%	70.06%	101.66%
Bea Cukai	50.95%	79.46%	100.00%
PNBP	51.89%	74.84%	100.00%
Belanja Negara	40.29%	62.88%	96.45%
Belanja Pemerintah Pusat	35.31%	56.81%	95.72%
Transfer Ke Daerah	43.48%	66.76%	96.91%
Surplus/Defisit	39.55%	57.06%	92.72%

Sumber: Perhitungan Kanwil DJPb Sumsel

B. Pelaksanaan APBD

Alokasi APBD Sumsel 2024 meningkat untuk mendukung arah kebijakan pembangunan. Pada tahun 2024, arah kebijakan pembangunan Sumsel membawa tema “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”. Target pendapatan daerah ditetapkan lebih tinggi Rp3,51 triliun atau naik 8,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, pagu belanja daerah dialokasikan lebih tinggi Rp4,03 triliun atau naik 9,73% dibandingkan tahun sebelumnya untuk mendukung program prioritas pembangunan Sumsel untuk penanganan bencana, pengendalian inflasi, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan pemilu dan pilkada, serta peningkatan ekonomi daerah.

Kinerja positif APBD di awal tahun 2024 memberikan fondasi kuat dalam menjaga perekonomian dan mendukung ketercapaian pembangunan di Sumsel. Pendapatan daerah tumbuh kuat diikuti dengan belanja daerah yang optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga Maret 2024, realisasi APBD Sumsel mencatatkan surplus dimana pendapatan daerah lebih tinggi dibandingkan belanja daerah. Dengan kinerja APBD Sumsel yang impresif, perekonomian Sumsel terjaga dengan inflasi yang terkendali serta aktivitas perekonomian masyarakat dalam tren yang positif. Hal ini menumbuhkan optimisme bagi Sumsel dalam pencapaian pembangunan dan prioritas daerah hingga akhir tahun 2024.

Tabel 2.3. Laporan Realisasi APBD Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2024

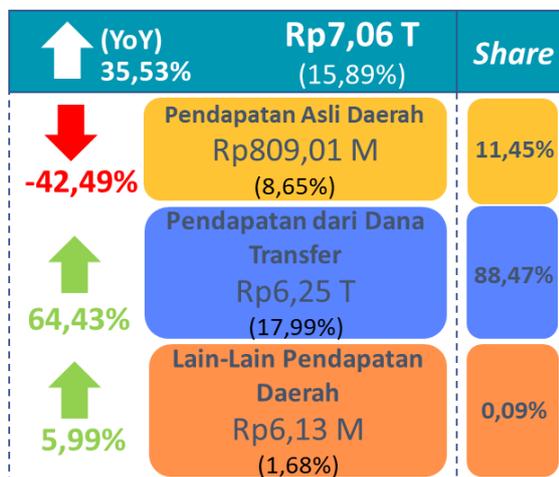
I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2023			TA 2024			% Growth 2023-2024
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
PENDAPATAN DAERAH	40,968.55	5,215.20	12.73%	44,481.61	7,068.13	15.89%	35.53%
PAD	9,701.62	1,406.62	14.50%	9,357.78	809.01	8.65%	-42.49%
Pajak daerah	6,527.93	1,055.92	16.18%	6,779.28	576.63	8.51%	-45.39%
Retribusi daerah	227.56	14.75	6.48%	241.87	11.96	4.95%	-18.92%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	370.40	208.58	56.31%	430.89	94.85	22.01%	-54.53%
Lain-lain PAD yang sah	2,575.73	127.37	4.95%	1,905.75	125.57	6.59%	-1.41%
Pendapatan Transfer	30,522.34	3,802.79	12.46%	34,758.53	6,252.99	17.99%	64.43%
Transfer Pemerintah Pusat	28,631.67	3,802.79	13.28%	32,383.19	6,184.06	19.10%	62.62%
Transfer Antar Daerah	1,890.67	0.00	0.00%	2,375.33	68.93	2.90%	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	744.58	5.79	0.78%	365.30	6.13	1.68%	5.99%
Pendapatan Hibah	84.74	5.36	6.33%	53.21	0.04	0.08%	-99.23%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	659.85	0.42	0.06%	312.10	6.09	1.95%	1338.09%
BELANJA DAERAH	41,491.35	3,265.01	7.87%	45,528.86	3,538.21	7.77%	8.37%
Belanja Operasi	26,824.06	2,878.82	10.73%	29,577.21	2,728.29	9.22%	-5.23%
Belanja Pegawai	14,401.81	1,952.65	13.56%	15,411.74	1,987.34	12.89%	1.78%
Belanja Barang dan Jasa	11,272.76	843.81	7.49%	12,039.97	656.97	5.46%	-22.14%
Belanja Bunga	80.33	11.76	14.64%	33.76	5.09	15.08%	-56.69%
Belanja Subsidi	14.58	1.54	10.54%	16.79	0.33	1.98%	-78.36%
Belanja Hibah	1,019.58	67.54	6.62%	2,009.33	78.18	3.89%	15.76%
Belanja Bantuan sosial	35.01	1.53	4.36%	65.62	0.38	0.58%	-75.21%
Belanja Modal	6,863.53	163.94	2.39%	7,552.18	184.13	2.44%	12.32%
Belanja Tidak Terduga	123.08	0.89	0.72%	422.76	2.03	0.48%	128.77%
Belanja Transfer	7,680.67	221.37	2.88%	7,976.71	623.77	7.82%	181.77%
Belanja Bagi Hasil	2,034.24	3.49	0.17%	2,313.83	391.86	16.94%	11126.12%
Belanja Bantuan Keuangan	5,646.43	217.88	3.86%	5,662.88	231.90	4.10%	6.43%
SURPLUS / DEFISIT	-522.79	1,950.18	-373.03%	-1,047.25	3,529.92	-337.06%	81.00%
PEMBIAYAAN	522.79	2,794.70	534.57%	1,047.25	8,327.88	795.21%	197.99%
Penerimaan Pembiayaan	1,412.68	2,921.30	206.79%	1,400.36	8,343.25	595.79%	185.60%
Pengeluaran Pembiayaan	889.88	126.60	14.23%	353.10	15.37	4.35%	-87.86%
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		4,744.88			11,857.80		149.91%

Sumber: Dit APK DJPb (2024, diolah)

B.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Sumsel tumbuh positif didorong realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga berakhirnya triwulan I 2024, realisasi pendapatan daerah Sumsel tercatat Rp7,06 triliun atau telah mencapai 15,89% dari target APBD 2024. Capaian tersebut lebih tinggi Rp1,85 triliun dari periode yang sama tahun lalu dengan kontributor utamanya adalah pendapatan transfer pemerintah pusat. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pendapatan daerah tumbuh *double digits* 35,53% (yoy), dimana dipengaruhi oleh akselerasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan khususnya Dana Desa, DAK Non Fisik, DAU, dan DBH yang telah salur sejak awal tahun anggaran 2024 dimulai. Berbagai upaya sinergi dan asistensi yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel kepada pemda menjadi titik kunci percepatan dalam pemenuhan syarat salur sehingga penyaluran dana perimbangan dapat dilakukan sesegera mungkin.

Grafik 2.8. Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Per Jenis Pendapatan Daerah



Sumber: Dit APK DJPb (2024, diolah)

Meskipun total pendapatan daerah Sumsel tumbuh positif, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kontraksi. Realisasi PAD tercatat Rp809,01 miliar atau 8,65% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 11,45% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan I 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi PAD turun 42,49% (yoy) yang dipengaruhi pajak daerah sebagai

kontributor utama PAD mengalami penurunan. Hal ini terindikasi terjadi sebagai dampak dari kebijakan baru PDRD Sumsel tahun 2024 diantaranya: penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang semula 1,5% menjadi 1%, tidak diberlakukannya lagi tarif pajak progresif untuk PKB kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, serta tidak dikenakannya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Realisasi pajak daerah mencatatkan Rp576,63 miliar atau 8,51% dari target, turun -45,39% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Grafik 2.9. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: Dit. APK DJPb (2024, diolah)

Kebijakan PDRD tahun 2024 juga menghadapi tantangan di Sumsel dengan munculnya ketentuan mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Isu kenaikan tarif atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa memunculkan protes dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel sebab ditetapkan tarifnya sebesar 40%. Menurut PHRI Sumsel, penetapan tersebut menyebabkan perkembangan jasa hiburan di wilayah Sumsel menjadi menurun. Hal ini sinkron dengan bagaimana kondisi pajak daerah yang sifatnya konsumsi seperti hiburan, hotel, restoran, dan parkir yang mengalami kontraksi di triwulan I. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kenaikan tarif PBJT atas jasa hiburan khusus di Sumsel mempengaruhi penurunan pajak daerah di triwulan I 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen PAD selain pajak daerah juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi retribusi daerah tercatat Rp11,96 miliar atau turun-18,92% (yoy) yang utamanya dipengaruhi penurunan kinerja retribusi jasa umum dan jasa usaha. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat Rp94,85 miliar atau turun-54,53% (yoy) yang dipengaruhi penurunan dividen atas penyertaan modal pada BUMD dan BUMN. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tercatat Rp125,57 miliar atau turun-1,41% (yoy) yang dipengaruhi penurunan penerimaan jasa giro, pendapatan denda pajak, dan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah.

Penurunan PAD di Sumsel juga menandai bahwa agenda penguatan *local taxing power* masih perlu perhatian ke depan. Hingga Maret 2024, rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau sering disebut *Local-Tax-to GRDP* di wilayah Sumsel berada di angka 0,38%. Angka tersebut masih dibawah angka ideal menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) yang seharusnya berada di angka minimum 3%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di wilayah Sumsel masih perlu untuk melakukan berbagai inovasi dan penggalian potensi perekonomian untuk meningkatkan kemampuan dalam menghimpun penerimaan daerah yang bersumber dari PDRD.

Grafik 2.10. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Pendapatan dari Dana Transfer



Sumber: Dit. APK DJPb (2024, diolah)

Pendapatan dari dana transfer terakselerasi dan bekerja optimal sejak awal tahun hingga triwulan I 2024. Realisasi pendapatan dari Dana Transfer tercatat Rp6,25 triliun atau 17,99% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 88,47% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan I 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pendapatan dari

dana transfer tumbuh positif 64,43% (yoy) yang utamanya dipengaruhi peningkatan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan juga pendapatan transfer antar daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan transfer pemerintah pusat bekerja impresif mengindikasikan terjadi percepatan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah di wilayah Sumsel. Pendapatan transfer pemerintah pusat tercatat Rp6,18 triliun atau tumbuh positif 62,62% (yoy). Capaian tersebut dikontribusikan oleh peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Minerba dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) juga turut berkontribusi khususnya beberapa DAU *specific grant* seperti DAU bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan pendanaan kelurahan yang telah salur hingga triwulan I 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan juga dikontribusikan dari peningkatan realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahap I yang telah salur, diikuti Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan Dinas tahap I yang telah tersalur hingga triwulan I 2024. Realisasi dana desa yang akseleratif sejak awal tahun juga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah pusat.

Tabel 2.4. Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Wilayah Sumatera Selatan Triwulan I 2024

Pemerintah Daerah	IKF	Kategori
Pemprov Sumsel	0.135	Belum Mandiri
Pemkab Musi Banyuasin	0.005	Belum Mandiri
Pemkab OKU	0.062	Belum Mandiri
Pemkab Muara Enim	0.135	Belum Mandiri
Pemkab Lahat	0.040	Belum Mandiri
Pemkab Musi Rawas	0.020	Belum Mandiri
Pemkab OKI	0.137	Belum Mandiri
Pemkab Banyuasin	0.048	Belum Mandiri
Pemkab OKU Timur	0.022	Belum Mandiri
Pemkab OKU Selatan	0.064	Belum Mandiri
Pemkab Ogan Ilir	0.107	Belum Mandiri
Pemkab Empat Lawang	0.010	Belum Mandiri
Pemkab PALI	0.071	Belum Mandiri
Pemkab MURATARA	0.047	Belum Mandiri
Pemkot Palembang	0.363	Menuju Kemandirian
Pemkot Prabumulih	0.165	Belum Mandiri
Pemkot Pagar Alam	0.016	Belum Mandiri
Pemkot Lubuk Linggau	0.029	Belum Mandiri

Sumber: Dit. APK DJPb (2024, diolah)

Meskipun pertumbuhan pendapatan transfer bekerja sangat optimal, namun di sisi lain hal ini juga menandai tingkat ketergantungan

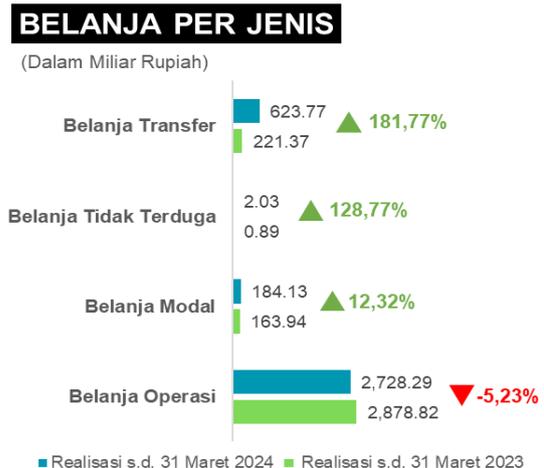
pemerintah daerah wilayah Sumsel terhadap dana perimbangan terpantau masih tinggi. Hingga Maret 2024, dari 18 pemerintah daerah di Sumsel, 17 pemerintah daerah memiliki indeks kemandirian fiskal (IKF) yang rendah sehingga masuk dalam kategori belum mandiri. Hanya pemerintah Kota Palembang yang kemandirian fiskalnya masuk dalam kategori menuju kemandirian.

Lain-lain pendapatan daerah menunjukkan tren yang positif hingga triwulan I 2024. Realisasi lain-lain pendapatan tercatat Rp6,13 miliar atau 1,68% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 0,09% dari total realisasi pendapatan daerah hingga triwulan I 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi lain-lain pendapatan daerah tumbuh positif 5,99% (yoy) yang utamanya dipengaruhi peningkatan realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibandingkan tahun sebelumnya. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku utamanya dikontribusikan dari pendapatan BLUD yang realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan hibah tercatat Rp 5,36 miliar atau turun -99,23% (yoy) yang dipengaruhi penurunan pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri.

B.2 Belanja Daerah

Belanja daerah Sumsel tumbuh positif didorong realisasi belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga berakhirnya triwulan I 2024, realisasi belanja daerah Sumsel tercatat Rp3,53 triliun atau telah mencapai 7,77% dari target APBD 2024. Capaian tersebut lebih tinggi Rp273.2 miliar dari periode yang sama tahun lalu dengan kontributor utamanya adalah belanja transfer. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja daerah tumbuh positif 8,37% (yoy), dimana dipengaruhi oleh belanja bagi hasil yang lebih tinggi karena pajak rokok telah tersalur di triwulan I 2024, peningkatan belanja tidak terduga untuk merespon bencana banjir di berbagai wilayah, serta peningkatan belanja modal khususnya terkait jalan, irigasi, dan jaringan di Sumsel.

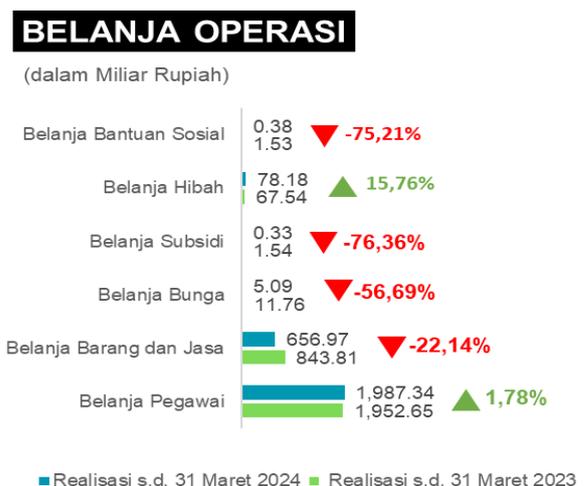
Grafik 2.11. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Daerah



Sumber: Dit. APK DJPb (2024, diolah)

Meskipun total belanja daerah Sumsel tumbuh positif, komponen belanja operasi mengalami kontraksi. Realisasi belanja operasi tercatat Rp2,72 triliun atau 9,22% dari target. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 77,11% dari total realisasi belanja daerah hingga triwulan I 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja operasi turun -5,23% (yoy) yang dipengaruhi realisasi belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, serta bantuan sosial hingga triwulan I 2024 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 2.12. Pertumbuhan Realisasi Per Jenis Belanja Operasi



Sumber: Dit. APK DJPb (2024, diolah)

Dilihat secara lebih rinci per jenis belanja operasi, realisasi belanja pegawai mencatatkan tren yang positif. Hingga triwulan I 2024, realisasi belanja pegawai tercatat Rp1,98 triliun atau 12,89% dari pagu APBD. Dari sisi

pertumbuhannya, realisasi belanja pegawai tumbuh positif 1,78% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan belanja gaji dan tunjangan, serta belanja pegawai BLUD yang didorong dari kenaikan gaji ASN 8% di tahun 2024, serta pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada akhir triwulan I 2024.

Belanja barang dan jasa terkontraksi pada triwulan I 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja barang dan jasa tercatat Rp656,97 miliar atau 5,46% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja barang dan jasa turun -22,14% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan pengeluaran belanja untuk bahan habis pakai, jasa kantor, premi asuransi, sewa gedung dan kendaraan, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta barang dan jasa BLUD. Namun demikian, belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja bunga juga mengalami kontraksi pada triwulan I 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja bunga tercatat Rp5,09 miliar atau 15,08% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja bunga turun -56,69% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan pengeluaran belanja bunga utang pinjaman dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja subsidi mencatatkan tren yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja subsidi tercatat Rp332,47 juta atau 1,98% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja subsidi turun -78,36% (yoy) dipengaruhi oleh realisasi belanja subsidi pada triwulan I 2024 yang tidak setinggi pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Belanja Hibah mencatatkan tren yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja hibah tercatat Rp78,18 miliar atau 3,89% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja hibah tumbuh positif 15,76% dipengaruhi oleh peningkatan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagai dampak dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 pada Februari.

Belanja bantuan sosial mencatatkan tren yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja bantuan sosial tercatat Rp378,35 juta atau 0,58% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja bantuan sosial turun -75,21% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan realisasi belanja bantuan sosial kepada masyarakat pada triwulan I 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kembali melihat berdasarkan jenis belanjanya, hingga triwulan I 2024 belanja modal turut mempengaruhi pertumbuhan belanja daerah di Sumsel. Realisasi belanja modal tercatat Rp184,13 miliar atau 2,44% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja modal tumbuh positif 12,33% (yoy) dikontribusikan oleh meningkatnya realisasi belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan signal positif dimana telah terjadi proses pengadaan barang dan jasa yang akseleratif untuk pekerjaan fisik sejak awal tahun, sehingga pengeluaran belanja modal di 2024 dapat lebih optimal untuk memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian dan masyarakat.

Selain belanja modal, pertumbuhan belanja daerah juga dikontribusikan dari peningkatan realisasi belanja tidak terduga dalam merespon berbagai bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Hingga triwulan I 2024, realisasi belanja tidak terduga tercatat Rp2,03 miliar atau 0,48% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja tidak terduga tumbuh positif 128,77% (yoy) sebagai respon untuk pengeluaran tidak terduga dalam penanganan kejadian banjir di wilayah Sumsel. Sebanyak 10 dari 18 pemda terdampak banjir yang dipicu oleh curah hujan yang berintensitas tinggi. Adapun wilayah yang terdampak banjir di Sumsel diantaranya Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih, dan Pagar Alam. Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dengan jumlah korban terdampak paling banyak di Sumsel.

Sebagai kontributor terbesar, belanja transfer menjadi pendorong utama dalam

pertumbuhan belanja daerah Sumsel di triwulan I 2024. Realisasi belanja transfer tercatat Rp623,77 miliar atau 7,82% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja transfer tumbuh positif 181,77% (yoy) dipengaruhi oleh adanya penyaluran pajak rokok pada triwulan I 2024, dimana tidak terjadi di triwulan I 2023. Sehingga ini meningkatkan penerimaan pajak daerah provinsi Sumsel, yang berimplikasi pada peningkatan belanja transfer bagi hasil pajak daerah dari Provinsi ke Kabupaten/Kota hingga triwulan I 2024.

B.3 Surplus/Defisit APBD

Pada tahun 2024, APBD Sumsel ditetapkan dengan anggaran defisit sebesar Rp1,04 triliun untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah. Anggaran defisit tersebut meningkat Rp524,45 miliar atau 100,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara praktiknya APBD disusun dengan kebijakan anggaran defisit dengan harapan dapat memberikan stimulus ekonomi, pembangunan infrastruktur, investasi, serta mengatasi kesenjangan ekonomi. Namun demikian, secara tren historis kondisi realisasi APBD di Sumsel selalu mencatatkan surplus.

Lebih tingginya kinerja pendapatan daerah dibandingkan belanja daerah di Sumsel mendorong terjadinya surplus APBD hingga triwulan I 2024. Dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,06 triliun dan belanja daerah mencapai Rp3,53 triliun, ini mencatatkan realisasi surplus APBD sebesar Rp3,53 triliun atau 2,25% dari PDRB Sumsel di triwulan I 2024. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi surplus APBD tumbuh positif 81% (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah yang lebih tinggi daripada peningkatan belanja daerah.

B.4 Pembiayaan Daerah

Anggaran pembiayaan daerah 2024 di Sumsel ditetapkan sebesar Rp1,04 triliun untuk menutup anggaran defisit. Anggaran penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp1,40 triliun sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp353,10 miliar. Dari sisi pertumbuhannya, anggaran penerimaan pembiayaan mengalami penurunan -0,872% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara

itu, anggaran pengeluaran pembiayaan juga penurunan -60,32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga triwulan I 2024, realisasi pembiayaan daerah mengalami tren yang meningkat.

Realisasi pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp8,37 triliun atau 795,21% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pembiayaan daerah tumbuh positif 197,99% (yoy) dikontribusikan dari peningkatan penerimaan pembiayaan disaat pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan. Penerimaan pembiayaan tercatat Rp8,34 triliun atau tumbuh positif 185,60% yang utamanya dikontribusikan dari penggunaan SILPA tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tercatat Rp15,37 miliar atau turun -87,86% (yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan penyertaan modal/investasi pemda dan penurunan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri hingga triwulan I 2024.

B.5 Prognosis Realisasi APBD

Hingga triwulan kedua di tahun 2024, realisasi APBD Sumsel diproyeksikan mengalami kontraksi baik dari sisi pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan daerah diproyeksikan mencatatkan Rp10,29 triliun atau 23,14% dari target APBD. Sementara itu, realisasi belanja daerah diproyeksikan mencatatkan Rp7,37 triliun atau 16,20% dari pagu APBD. Dari sisi proyeksi pertumbuhannya, realisasi pendapatan daerah akan mengalami kontraksi-17,98% (yoy) dan pada saat yang sama realisasi belanja daerah akan mengalami kontraksi -29,34% (yoy) hingga triwulan II 2024.

Tabel 2.5. Proyeksi Realisasi APBD s.d. Tw IV 2024 (%)

Akun (%)	s.d. Q2 2024	s.d. Q3 2024	s.d. Q4 2024
Pendapatan Daerah	23.14%	61.84%	101.47%
PAD	16.28%	52.18%	88.34%
Pendapatan Transfer	25.55%	66.99%	106.69%
Lain-lain Pendapatan yang sah	8.66%	31.40%	71.44%
Belanja Daerah	16.20%	50.08%	97.12%
Belanja Operasi	19.21%	52.12%	93.36%
Belanja Modal	6.40%	44.92%	118.14%
Belanja Tidak Terduga	2.23%	10.66%	25.01%
Belanja Transfer	12.44%	49.25%	77.24%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (2024, diolah)

Kendati demikian, hingga triwulan ketiga dan keempat di tahun 2024, realisasi APBD Sumsel akan kembali berekspansi baik dari sisi pendapatan dan belanja. Hingga triwulan III, realisasi pendapatan daerah diproyeksikan mencatatkan Rp27,50 triliun atau 61,84% dari target APBD. Sementara itu, realisasi belanja daerah diproyeksikan mencatatkan Rp22,80 triliun atau 50,08% dari pagu APBD.

Dari sisi proyeksi pertumbuhannya, realisasi pendapatan daerah akan mencatatkan tren

positif 7,40% (yoy) dan pada saat yang sama realisasi belanja daerah akan tumbuh positif 0,02% (yoy). Hingga triwulan IV, realisasi pendapatan dan belanja daerah akan semakin meningkat dimana diproyeksikan pendapatan daerah akan tercatat Rp43,15 triliun dan belanja daerah tercatat Rp44,21 triliun. Pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan akan menyentuh angka 6,16% (yoy) dan belanja daerah diproyeksikan tumbuh 2,36% (yoy).

C. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dilakukan eliminasi akun-akun resiprokal. Dalam hal ini eliminasi dilakukan terhadap belanja tranfer ke daerah dari sisi LRA pemerintah pusat di eliminasi dengan pendapatan transfer dari sisi LRA pemerintah daerah.

Pendapatan konsolidasian wilayah Sumsel sampai dengan Triwulan I tahun 2024 mencapai Rp5,52 triliun dimana capaian ini sedikit menurun -1% (yoy). Pendapatan tersebut mayoritas lebih disumbang oleh peran pendapatan pemerintah pusat sebesar Rp3,88 triliun atau 70,13% dari total pendapatan konsolidasian. Pada aspek pendapatan yang bersumber dari perpajakan, Pemerintah Pusat masih mendominasi dengan porsi 84,31%, namun pada periode ini, capaian PNB pada Tingkat konsolidasian Pemda sedikit mendominasi dengan porsi 57,58% dari total PNB. Angka PNB pada pemerintah daerah dan Belanja Transfer pada pemerintah pusat merupakan angka setelah dilakukan eliminasi akun resiprokal antara pendapatan transfer

pemda dan belanja transfer pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan sinyal bahwa aspek PNB yang didapatkan oleh daerah pada periode ini sudah semakin baik dan perlu untuk terus ditingkatkan.

Belanja konsolidasian wilayah Sumsel hingga Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp8,5 triliun dimana tumbuh positif 14% (yoy). Dari sisi belanja, kontribusi dari belanja pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan pemerintah pusat hingga periode Maret 2024. Pemerintah pusat berkontribusi sebesar 59,28%, sementara pemerintah daerah berkontribusi sebesar 40,72%. Dari sisi belanja pemerintah dan transfer, peran daerah telah mampu memberikan kontribusi sebesar 43,80% dan 29,64% dalam menggerakkan aktivitas perekonomian melalui kebijakan fiskal di Sumsel. Secara agregat, capaian ini membaik 14% apabila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga triwulan I tahun 2024, defisit konsolidasian sebesar Rp2,99 triliun dimana tumbuh negatif 59% (yoy). Defisit didominasi oleh kontribusi pemerintah daerah yang mencapai 61,1%. Pembiayaan konsolidasian pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp8,33 triliun yang tumbuh positif 198% (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi naiknya penerimaan pembiayaan dari pemerintah daerah pada triwulan I tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.6. Laporan Realisasi APBD Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2024

Uraian	2023		2024				% Growth 2023-2024
	Konsolidasian	Konsolidasian	Pusat	Daerah	Kontribusi		
					Pusat	Daerah	
A. PENDAPATAN	5.560,69	5.520,05	3.880,95	1.639,10	70,31%	29,69%	-1%
I. Perpajakan	4.481,28	3.674,81	3.098,18	576,63	84,31%	15,69%	-18%
II, PNPB	1.074,05	1.845,20	782,77	1.062,43	42,42%	57,58%	72%
III, Hibah	5,36	0,04	0,00	0,04	0%	100,00%	-99%
B. BELANJA	7.439,60	8.505,23	5.042,11	3.463,12	59,28%	40,72%	14%
I. Belanja Pemerintah	5.361,83	6.653,93	3.739,48	2.914,45	56,20%	43,80%	24%
II. Transfer	2.077,77	1.851,30	1.302,62	548,67	70,36%	29,64%	-11%
C. SURPLUS/DEFISIT	-1.878,91	-2.985,18	-1.161,16	-1.824,02	38,90%	61,10%	-59%
D. PEMBIAYAAN	2.794,70	8.327,88	0,00	8.327,88	0,00%	100,00%	198%
I. Penerimaan	2.921,30	8.343,25	0,00	8.343,25	0,00%	100,00%	186%
II. Pengeluaran	126,60	15,37	0,00	15,37	0,00%	100,00%	-88%
E. SILPA (SIKPA)	915,79	5.342,70	-1.161,16	6.503,86	-21,73%	121,73%	483%

Sumber: Dit, APK, LKPD, dan SIKRI, (2024)

D. Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah pusat-tingkat wilayah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat di Sumatera Selatan hingga triwulan I tahun 2024 dibandingkan triwulan I 2023 (YoY), terdiri dari: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Tabel 2.7. Ringkasan Neraca LKPP-TW I Sumsel 2024-2023

Uraian	TW I 2024 (Rp miliar)	TW I 2023 (Rp miliar)	% Growth
Aset			
Aset lancar	6.912,15	5.557,91	24,37
Aset Tetap	201.475,87	185.587,77	8,56
Properti Investasi	16,58	0	100
Piutang Jangka Panjang	7,34	7,43	(1,28)
Aset Lainnya	693,28	3.301,01	(79)
Total Aset	209.105,22	194.454,12	7,53
Kewajiban			
Kewajiban Jk. Pendek	673,56	684,90	(1,66)
Kewajiban Jk. Panjang	0	0,00	(100)
Total Kewajiban	1.921,34	684,90	180,53
Ekuitas	207.183,88	193.769,21	6,92
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	209.105,22	194.454,12	7,53

Sumber: Dit. APK DJPb (2024, diolah)

Tabel 2.7 menyajikan ringkasan neraca per 31 Maret 2024 dibandingkan dengan 31 Maret 2023 (YoY). Posisi keuangan Pemerintah pusat wilayah Sumatera Selatan per 31 Maret 2024 menunjukkan total Aset sebesar Rp209,1 triliun meningkat 7,5% dibandingkan dengan total aset per 31 Maret 2023 sebesar Rp194,4 triliun. Kewajiban juga meningkat signifikan hingga 180,5% sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp1,9 triliun dibandingkan jumlah kewajiban tahun lalu sebesar Rp684,9 miliar. Ekuitas juga tumbuh positif sebesar 6,9% sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar

Rp207,2 triliun dibandingkan total ekuitas per triwulan I tahun 2023 sebesar Rp193,8 triliun.

Kenaikan Aset 7,5% hingga triwulan I 2024 (YoY) karena beberapa komponen aset tumbuh positif, walaupun terdapat aset lain menurun.

Aset Lancar tumbuh positif 24,4% dipengaruhi oleh Kas Lainnya dan Setara Kas meningkat signifikan dari semula Rp42,3 miliar pada tahun lalu menjadi Rp1 triliun pada tahun ini yang ditempatkan dalam bentuk deposito kurang dari 3 bulan untuk pembiayaan Pilkada. Kenaikan Aset Lancar juga dipengaruhi oleh Kas di Bendahara Penerimaan yang meningkat menjadi Rp2,6 miliar dari semula Rp211,9 juta. Komponen Aset yang juga berkontribusi besar terhadap kenaikan Aset Lancar dipengaruhi oleh Piutang dari Kas Umum Negara (Uang Muka yang Akan Diterima) yang meningkat signifikan dari semula Rp374,2 juta tahun lalu menjadi Rp6,2 miliar s.d. triwulan I tahun ini.

Aset Tetap juga tumbuh positif sebesar 8,6% dipengaruhi oleh Aset Konsesi Jasa meningkat 100% sebesar Rp4,2 triliun karena tidak ada aset tersebut s.d. triwulan I tahun lalu. Selain itu, komponen Aset Tetap Lainnya, Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Peralatan dan Mesin juga termasuk komponen aset yang berkontribusi terhadap kenaikan Aset Tetap. Adapun Aset Properti Investasi juga meningkat 100% sebesar Rp16,6 miliar karena tidak ada komponen aset tersebut pada periode yang sama tahun lalu sampai dengan 31 Maret 2023.

Namun demikian, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya mengalami penurunan sampai dengan triwulan I tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu masing-masing turun sebesar 1,3% dan 79%. Penurunan piutang jangka panjang dipengaruhi oleh Tagihan/Tuntutan Ganti Rugi turun signifikan dari semula Rp7,7 miliar pada tahun lalu menjadi Rp188 juta pada triwulan I tahun 2024

Adapun penurunan Aset Lainnya dipengaruhi oleh komponen aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp2,9 triliun yang tercatat pada tahun lalu, namun tidak ada lagi pada tahun ini antara lain pembangunan jalan tol Prabumulih telah selesai dilaksanakan pada tahun lalu. Selain itu, penurunan Aset Lainnya juga dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif Aset Tak Berwujud, Akumulasi Penyusutan, dan Amortisasi Aset Lainnya.

Adapun dari sisi kewajiban, Kewajiban Jangka Pendek mengalami penurunan 1,7% (yoy) dan Kewajiban Jangka Panjang juga turun 100%. Penurunan Kewajiban Jangka Pendek dipengaruhi oleh Utang kepada Pihak Ketiga turun dari semula (Rp599,4 juta) sampai dengan triwulan I tahun 2023 menjadi Rp310,9 miliar pada triwulan I tahun 2024. Selain itu, penurunan Kewajiban Jangka Pendek juga dipengaruhi oleh Uang Transfer yang turun dari semula Rp439,6 miliar menjadi Rp54,8 miliar dan Pendapatan Diterima Dimuka juga turun dari semula Rp21,4 miliar sampai dengan triwulan I 2023 menjadi Rp9,3 miliar sampai dengan triwulan I tahun 2024.

Adapun total Ekuitas sampai dengan 31 Maret 2024 meningkat sebesar 6,9% dari semula Rp193,8 triliun hingga triwulan I tahun lalu menjadi Rp207,2 triliun s.d. triwulan I tahun ini.

Box 2

Pengaruh Belanja Daerah Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan

IPM Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan dan masuk dalam kategori tinggi. Pada tahun 2023, IPM mencapai 73,18, meningkat 0,97 persen dibandingkan tahun 2022. Meskipun masuk dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$), IPM Sumsel masih dibawah IPM rata-rata nasional yang sebesar 74,39. Pendidikan sebagai salah satu dimensi yang diukur dalam IPM, dianggap sebagai investasi penting dalam pembangunan manusia, karena peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan dan ekonomi. Dalam konteks ini, belanja pendidikan oleh pemda diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan IPM melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, mutu pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengeluaran pemerintah daerah dalam sektor pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Mongan, 2019). Searah dengan hasil penelitian tersebut, Astri et al. (2013) juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Dengan harapan dapat diidentifikasi sejauh mana belanja daerah fungsi pendidikan berkontribusi terhadap perbaikan IPM, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menggunakan data sekunder dari 18 kabupaten/kota selama periode 2021-2023, studi ini menerapkan analisis regresi berganda data panel dengan model *random effect*. Hasil menunjukkan bahwa belanja daerah fungsi pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM, dimana setiap peningkatan realisasi belanja daerah fungsi pendidikan sebesar satu maka menurunkan nilai IPM sebesar 0,759779.

Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk dapat menciptakan pengaruh peningkatan pada IPM, pemda di Provinsi Sumatera Selatan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas belanja fungsi pendidikan untuk dapat berdampak pada pembangunan manusia. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- Evaluasi Alokasi Anggaran: Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam APBD. Alokasi anggaran harus didistribusikan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah, serta berdasarkan prioritas yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan manusia.
- Peningkatan Kualitas Penggunaan Dana: Selain mengevaluasi alokasi, penting juga untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara optimal. Fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, kurikulum, dan fasilitas pendidikan dapat membantu meningkatkan hasil pendidikan dan, pada akhirnya, IPM.
- Pengembangan Program Pendidikan yang Relevan: Pemerintah daerah perlu mengembangkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja lokal. Program ini dapat membantu meningkatkan keterampilan kerja dan peluang ekonomi bagi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap IPM.
- Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan: Perlu upaya untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Sumsel, termasuk di daerah pedesaan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal dapat membantu meningkatkan IPM secara keseluruhan.

BAB III: PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH



A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pemberdayaan ekonomi lokal (*local economic empowering*) merupakan kunci untuk membangun ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Pada era globalisasi yang penuh tantangan, penguatan ekonomi dari akar rumput menjadi sangat penting, yaitu dengan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah. UMKM telah lama diakui sebagai agen penting dalam pembangunan ekonomi lokal/regional. Mereka memainkan peranan vital dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel sangat berpotensi untuk diperkuat dan ditingkatkan melalui pemberdayaan UMKM. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, jumlah UMKM di Sumsel mencapai 673.391 unit, menyerap hampir 70% tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Sumsel sebesar 60,4%. Data tersebut menunjukkan peran vital UMKM dalam menggerakkan ekonomi daerah di Provinsi Sumsel.

Pemberdayaan UMKM oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di Wilayah Provinsi Sumsel, merupakan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM Kantor Pusat DJPb dalam rangka penguatan tugas dan fungsi DJPb yang dilaksanakan oleh Kantor Vertikal DJPb dan disinergikan dengan pemberdayaan UMKM Kelompok Kerja Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu wilayah Sumsel dan pemberdayaan secara umum di wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel.

A.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Kegiatan Sinergi Pemberdayaan UMKM DJPb dimaksudkan sebagai bagian dari Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu dengan fokus pada pelaksanaan tugas dan

fungsi DJPb serta kebutuhan pengembangan usaha masing-masing UMKM.

Tujuan

Tujuan Pemberdayaan UMKM Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain adalah:

- 1) mendorong belanja pemerintah untuk UMKM
- 2) mendorong inklusi keuangan UMKM, terutama bagi UMKM yang sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan (non-Bankable)
- 3) mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Ruang Lingkup

Kegiatan Pemberdayaan UMKM oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel dan KPPN di wilayah kerja mencakup:

- a. Pemberdayaan UMKM dalam rangka penguatan tugas dan fungsi DJPb yang dilaksanakan oleh Kanwil dan KPPN sebagaimana tugas rutin/eksisting yang telah dilaksanakan selama ini. Penguatan tugas dan fungsi tersebut disinergikan dengan pemberdayaan UMKM secara umum yang dilakukan oleh seluruh pihak di wilayah kerja Kanwil dan KPPN.
- b. Pemberdayaan UMKM terhadap UMKM yang mendapatkan program pemberdayaan oleh Kanwil dan KPPN meliputi tahapan: persiapan, pelaksanaan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan UMKM.

B. Kategori UMKM

B.1. Definisi Teknis

Sesuai dengan KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu, kriteria pelaku UMKM yang digunakan dalam kegiatan Pemberdayaan UMKM oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel dan KPPN di Wilayah Kerja mengikuti klasifikasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar di luar tanah dan bangunan usaha, dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar;
- b. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga maksimal Rp5 miliar di luar tanah dan bangunan usaha, dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga maksimal Rp15 miliar; dan
- c. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar hingga maksimal Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan usaha, dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar hingga maksimal Rp50 miliar.

B.2. UMKM Naik Kelas

Untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan perencanaan, Pemberdayaan UMKM oleh Kantor Instansi Vertikal Kanwil DJPb di Sumsel menggunakan 3 (tiga) klasterisasi UMKM yang tertuang dalam KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu, yaitu: UMKM Rintisan, UMKM Siap Mandiri, dan UMKM Siap Ekspor.

UMKM Rintisan, merupakan pelaku UMKM yang memiliki kriteria usaha sebagai berikut:

- 1) belum memiliki rekening bank;
- 2) belum melakukan pencatatan usaha;
- 3) belum memisahkan keuangan pribadi dengan usaha;
- 4) belum mampu menyusun laporan keuangan usaha;
- 5) belum mampu mengakses pembiayaan dari lembaga formal;
- 6) belum menggunakan media pemasaran dan promosi secara *online*;
- 7) belum pernah mengikuti bazaar atau pameran baik di dalam maupun luar negeri
- 8) belum memiliki NPWP, NIB, dan izin usaha lainnya;
- 9) Produk belum berorientasi ekspor;

UMKM Siap Mandiri, merupakan pelaku UMKM yang memiliki kriteria usaha sebagai berikut:

- 1) memiliki rekening bank yang tercampur untuk transaksi pribadi dan usaha;
- 2) telah melakukan pencatatan usaha sederhana, tetapi belum mampu menyusun laporan keuangan usaha;
- 3) telah mampu mengakses pembiayaan usaha dari lembaga formal;
- 4) telah aktif menggunakan media pemasaran dan promosi secara *online* dengan jangkauan transaksi hingga ke luar kota;
- 5) pernah mengikuti bazaar atau pameran dalam negeri
- 6) sudah memiliki NPWP, NIB, dan izin usaha lainnya
- 7) produk belum berorientasi ekspor namun sudah mengetahui mengenai tata cara ekspor
- 8) sudah mengetahui mengenai cara untuk terhubung dengan calon pembeli dari luar negeri tetapi belum implementasi.

UMKM Siap Ekspor

- 1) memiliki rekening bank terpisah antara transaksi pribadi dan usaha;
- 2) telah melakukan pencatatan usaha dan mampu menyusun laporan keuangan usaha;
- 3) telah mampu mengakses pembiayaan usaha dari lembaga formal;
- 4) telah aktif menggunakan media pemasaran dan promosi secara online dengan jangkauan transaksi hingga ke luar negeri;
- 5) pernah mengikuti bazaar atau pameran di luar negeri;
- 6) sudah memiliki NPWP, NIB, dan usaha lainnya;
- 7) produk berorientasi ekspor;
- 8) sudah mengetahui tata cara ekspor dan siap melakukan ekspor;
- 9) sudah mengetahui mengenai cara untuk terhubung dengan calon pembeli dari luar negeri dan secara aktif implementasi.

Berdasarkan klasterisasi tersebut diatas, UMKM Naik Kelas diartikan sebagai peningkatan usaha yang dialami oleh UMKM mulai dari awal pelaku UMKM merintis usaha yang membutuhkan bimbingan, kemudian berkembang sehingga dapat berusaha secara mandiri, dan terus

meningkatkan produktivitas usahanya hingga dipasarkan ke luar negeri.

Untuk kepentingan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan UMKM klasterisasi ini dipedomani sebagai salah satu indikator keberhasilan pembinaan. Dengan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan UMKM Naik Kelas adalah peningkatan kelompok Usaha Mikro dari UMKM Rintisan menjadi UMKM Siap Mandiri dan UMKM Siap Ekspor sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan.

C. Hasil Profiling UMKM

C.1. Profiling oleh Kantor Vertikal DJPb Sumsel

Profiling UMKM dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan informasi tentang karakteristik dan kondisi bisnis UMKM. Profiling yang telah dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan UMKM Kanwil DJPb Provinsi Sumsel dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Survei dan Wawancara

Kegiatan wawancara dan survei dilakukan untuk inventarisasi data dan informasi UMKM dan pemilik/pelaku usahanya yang menjadi obyek profiling. Data sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dimaksud.

Kegiatan profiling UMKM di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu profiling terhadap calon UMKM Binaan yang baru dan reprofiling terhadap 18 UMKM yang sebelum periode ini telah menjadi UMKM Binaan dan telah memperoleh berbagai upaya pemberdayaan melalui berbagai kegiatan.

Kegiatan profiling calon UMKM Binaan yang baru dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2024 pada tanggal 21 dan 25 maret 2024. Tim Pemberdayaan UMKM Kanwil DJPb Sumsel menggunakan metode survei dan wawancara dengan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep-112/PB/2023 dengan format pertanyaan sesuai dengan Lampiran I. Survei dan Wawancara dilakukan terhadap 2 (dua) UMKM di wilayah Kota Palembang Provinsi Sumsel yaitu:

- 1) Fayyaza Handmade dikelola dan dimiliki oleh Asmiar Wana Yana, UMKM bergerak di Industri Pengolahan, dengan produk tas, dan dompet berbahan tekstile tradisional (Kain Songket, Kain Jumputan), manik-manik, dan Produk Kain Eco Printing berbahan kulit kambing.
- 2) Benawa Coffe Roaster dikelola dan dimiliki oleh Deny Martindo, UMKM Industri Pengolahan Kopi Robusta dan Arabica dari daerah Kabupaten Pagar Alam Sumsel.

Selain profiling terhadap 2 pelaku UMKM tersebut, Tim Pemberdayaan UMKM juga melakukan interview dengan Asosiasi UMKM Sriwijaya yang berada di Kota Palembang. Asosiasi ini mengkoordinasi dan memberdayakan lebih dari 100 UMKM di wilayah Kota Palembang dan beberapa Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sumsel.

Kegiatan reprofiling dilakukan terhadap 18 UMKM Binaan yang pada tahun sebelumnya telah menjadi UMKM Binaan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel. Tujuan Reprofiling ini adalah untuk monitoring, evaluasi dan pemantauan dampak kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Reprofiling ini dilaksanakan dengan survei dan interview menggunakan format pertanyaan sesuai Lampiran I Kep-112/PB/2023 melalui Kuesioner *Google Form*, dan dikonfirmasi melalui *interview* per telepon dengan pelaku usaha terkait.

b. Mengklasifikasikan UMKM

Berdasarkan hasil interview dengan format pertanyaan sesuai Lampiran I Kep-112/PB/2023, selanjutnya dilakukan klasifikasi UMKM berdasarkan hasil input data interview sesuai Lampiran II Kep-112/PB/2023. Berdasarkan data yang dibuat berdasarkan Lampiran II tersebut, selanjutnya UMKM Binaan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel diklasifikasikan dan atau dipetakan berdasarkan:

- 1) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik, dan menjadi acuan Online Single Submission yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), salah satunya untuk kepentingan sistem perizinan usaha;

- 2) Klasifikasi Berdasarkan Skala Usaha sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- 3) Klasterisasi berdasarkan Kapasitas Usaha sesuai Kep-112/PB/2023, yang mengklasifikasikan UMKM berdasarkan Kapasitas Usaha dengan kriteria-kriteria tertentu pada kelompok UMKM: Rintisan, Siap Mandiri dan Siap Ekspor.

Hasil pengklasifikasian dicantumkan pada bagian berikutnya dari laporan ini.

c. Pemilihan UMKM

Berdasarkan hasil profiling dan pengklasifikasian, 2 UMKM baru diakomodasi untuk menjadi UMKM Binaan yang akan diberdayakan, sedangkan dari 18 UMKM Binaan yang lama, 2 diantaranya dinyatakan mengundurkan diri karena tidak merespon koordinasi dan komunikasi kegiatan profiling yang dilakukan, sementara 1 UMKM Binaan lama yaitu Kassa_Cake & Dessert dialihkan sebagai UMKM Binaan KPPN Palembang dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

Upaya memperoleh UMKM Binaan baru dan mengkolaborasikan kegiatan pemberdayaan dengan Asosiasi UMKM Sriwijaya, diputuskan untuk tidak diteruskan dan/atau ditunda, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemberdayaan. Karena berdasarkan hasil interview, asosiasi ini memiliki sistem dan program tersendiri dalam pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, hingga profiling dan reprofiling diselesaikan, terdapat 17 UMKM Binaan yang menjadi data basis kegiatan Pemberdayaan UMKM oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumsel.

Pemilihan 17 UMKM Binaan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan kapasitas dan sumberdaya di Kanwil DJPb Provinsi Sumsel. Pemberdayaan yang bersifat Intensif akan diberikan kepada UMKM pada klaster UMKM Rintisan dan Siap Mandiri. Sedangkan UMKM pada klaster Siap Ekspor akan dilakukan pemberdayaan yang bersifat Insidental.

C.2. Hasil Profiling

Pemetaan UMKM Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

No.	Nama UMKM	Pemilik	Bidang Usaha KBLI
1.	Bunan	Ananda Pragamatari	Industri Pengolahan
2.	Sale Aziz	Azizah	Industri Pengolahan
3.	Dimsum Mbak Mecca	Desi Astuti	Industri Pengolahan
4.	Kcharis Tenun	Dwi Yuliana	Industri Pengolahan
5.	Cemilan One	Farida	Industri Pengolahan
6.	Bumbu Salero Bundo	Imelda Sukmawati	Industri Pengolahan
7.	Dapoer Mbak Linda	Jimi Karyadi	Industri Pengolahan
8.	Souvenir Cek Ala	KGS M Dani	Industri Pengolahan
9.	Kaldin	Khoiri Pratiwi	Industri Pengolahan
10.	Nd.Rizky'S	Mastidawatty	Industri Pengolahan
11.	Ayib Handmade	RA Mujaningsih	Industri Pengolahan
12.	Jajan Pasar Mbak Santi	Santi Herawati	Industri Pengolahan
13.	Pempek Labibah	Siska Hariyani	Industri Pengolahan
14.	Baito	Sri Indrawati	Industri Pengolahan
15.	Rumah Asaku	Yeka Herlina	Industri Pengolahan
16.	Fayyaza Handmade	Asmiar Wana Yana	Industri Pengolahan
17.	Bennawa Coffe Roaster	Denny Martindo	Industri Pengolahan

Pemetaan UMKM Berdasarkan Klasifikasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021

No.	Nama UMKM	Modal Usaha	Kelompok Skala Usaha
1.	Bunan	0-250 Juta	Usaha Mikro
2.	Sale Azizi	0-250 Juta	Usaha Mikro
3.	Dimsum Mbak Mecca	0-250 Juta	Usaha Mikro
4.	Kcharis Tenun	0-250 Juta	Usaha Mikro
5.	Cemilan One	0-250 Juta	Usaha Mikro
6.	Bumbu Salero Bundo	0-250 Juta	Usaha Mikro
7.	Dapoer Mbak Linda	0-250 Juta	Usaha Mikro
8.	Souvenir Cek Ala	0-250 Juta	Usaha Mikro
9.	Kaldin	0-250 Juta	Usaha Mikro
10.	Nd.Rizky'S	0-250 Juta	Usaha Mikro
11.	Ayib Handmade	0-250 Juta	Usaha Mikro
12.	Jajan Pasar Mbak Santi	0-250 Juta	Usaha Mikro
13.	Pempek Labibah	0-250 Juta	Usaha Mikro
14.	Baito	0-250 Juta	Usaha Mikro
15.	Rumah Asaku	0-250 Juta	Usaha Mikro
16.	Fayyaza Handmade	0-250 Juta	Usaha Mikro
17.	Bennawa Coffe Roaster	0-250 Juta	Usaha Mikro

Klasterisasi UMKM Berdasarkan KMK No. 396/KMK.01/2022

No.	Nama UMKM	Pemilik	Klasifikasi Klaster
1.	Bennawa Coffe Roaster	Denny Martindo	Siap Ekspor
2.	Bunan	Ananda Pragamatari	Siap Ekspor
3.	Sale Aziz	Azizah	Rintisan
4.	Dimsum Mbak Mecca	Desi Astuti	Siap Mandiri
5.	Kcharis Tenun	Dwi Yuliana	Siap Mandiri
6.	Cemilan One	Farida	Rintisan
7.	Bumbu Salero Bundo	Imelda Sukmawati	Siap Mandiri
8.	Dapoer Mbak Linda	Jimi Karyadi	Siap Mandiri
9.	Souvenir Cek Ala	KGS M Dani	Siap Mandiri
10.	Kaldin	Khoiri Pratiwi	Siap Ekspor
11.	Nd.Rizky'S	Mastidawatty	Siap Mandiri
12.	Ayib Handmade	RA Mujaningsih	Siap Mandiri
13.	Jajan Pasar Mbak Santi	Santi Herawati	Rintisan
14.	Pempek Labibah	Siska Hariyani	Siap Mandiri
15.	Baito	Sri Indrawati	Siap Mandiri
16.	Rumah Asaku	Yeka Herlina	Siap Mandiri
17.	Fayyaza Handmade	Asmiar Wana Yana	Siap Mandiri

C.3. UMKM Terpilih

a. Profil UMKM Terpilih

Berdasarkan hasil profiling dan klasterisasi UMKM selanjutnya ditentukan UMKM yang dipilih untuk mendapatkan pemberdayaan dan strategi pemberdayaannya. Pemberdayaan intensif dilaksanakan pada UMKM yang masuk

dalam Klaster UMKM Rintisan dan UMKM Siap Mandiri. Sedangkan UMKM dengan klasifikasi Siap Ekspor dilakukan pemberdayaan yang bersifat insidental.

Pemberdayaan intensif dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan usaha, kendala yang dihadapi dan untuk memastikan saran dan masukan dilaksanakan oleh pelaku UMKM.

Pemberdayaan insidental dimaksudkan untuk memantau perkembangan usaha UMKM Siap Ekspor.

No.	Nama UMKM	Pemilik	Keputusan
1.	Bennawa Coffe Roaster	Denny Martindo	Diberdayakan
2.	Bunan	Ananda Pragamatari	Diberdayakan
3.	Sale Azizi	Azizah	Diberdayakan
4.	Dimsum Mbak Mecca	Desi Astuti	Diberdayakan
5.	Kcharis Tenun	Dwi Yuliana	Diberdayakan
6.	Cemilan One	Farida	Diberdayakan
7.	Bumbu Salero Bundo	Imelda Sukmawati	Diberdayakan
8.	Dapoer Mbak Linda	Jimi Karyadi	Diberdayakan
9.	Souvenir Cek Ala	KGS M Dani	Diberdayakan
10.	Kaldin	Khoiri Pratiwi	Diberdayakan
11.	Nd.Rizky'S	Mastidawatty	Diberdayakan
12.	Ayib Handmade	RA Mujaningsih	Diberdayakan
13.	Jajan Pasar Mbak Santi	Santi Herawati	Diberdayakan
14.	Pempek Labibah	Siska Hariyani	Diberdayakan
15.	Baito	Sri Indrawati	Diberdayakan
16.	Rumah Asaku	Yeka Herlina	Diberdayakan
17.	Fayyaza Handmade	Asmiar Wana Yana	Diberdayakan

b. Kebutuhan Pemberdayaan

Sifat Kegiatan Pemberdayaan Berdasarkan Klasifikasi Klaster

No.	Nama UMKM	Klasifikasi Klaster	Sifat Pemberdayaan
1.	Bennawa Coffe Roaster	Siap Ekspor	Insidental
2.	Bunan	Siap Ekspor	Intensif
3.	Sale Azizi	Rintisan	Intensif
4.	Dimsum Mbak Mecca	Siap Mandiri	Intensif
5.	Kcharis Tenun	Siap Mandiri	Intensif
6.	Cemilan One	Rintisan	Intensif
7.	Bumbu Salero Bundo	Siap Mandiri	Intensif
8.	Dapoer Mbak Linda	Siap Mandiri	Intensif
9.	Souvenir Cek Ala	Siap Mandiri	Intensif
10.	Kaldin	Siap Ekspor	Intensif
11.	Nd.Rizky'S	Siap Mandiri	Intensif
12.	Ayib Handmade	Siap Mandiri	Intensif
13.	Jajan Pasar Mbak Santi	Rintisan	Intensif
14.	Pempek Labibah	Siap Mandiri	Intensif
15.	Baito	Siap Mandiri	Intensif
16.	Rumah Asaku	Siap Mandiri	Intensif
17.	Fayyaza Handmade	Siap Mandiri	Intensif

Identifikasi Kebutuhan Pemberdayaan

No.	Nama UMKM	Sifat Pemberdayaan	Kebutuhan Pemberdayaan
1.	Bennawa Coffe Roaster	Insidental	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi event kegiatan promosi, pameran produk siap ekspor b. Memberikan informasi peluang pasar ekspor
2.	Bunan	Intensif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan usaha dalam bentuk: edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran, asistensi, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif pembiayaan kredit program. menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.
3.	Sale Aziz	Intensif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan usaha dalam bentuk: edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi. b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program, menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.
4.	Dimsum Mbak Mecca	Intensif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan usaha dalam bentuk: edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran, asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi. b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program, menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.
5.	Kcharis Tenun	Intensif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan usaha dalam bentuk: edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi. b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif

			<p>pembiayaan kredit program, menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p>
6.	Cemilan One	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk: edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi.</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program, menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p>
7.	Bumbu Salero Bundo	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk : edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program. Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p>
8.	Dapoer Mbak Linda	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk: edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi.</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program. Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p> <p>c. Sertifikasi halal</p>
9.	Souvenir Cek Ala	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk : edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program.</p>

			Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.
10.	Kaldin	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk : edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program. Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p>
11.	Nd.Rizky'S	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk : edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi.</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program. Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p>
12.	Ayib Handmade	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk : edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program. Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p>
13.	Jajan Pasar Mbak Santi	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk : edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi.</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program. Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p> <p>c. Sertifikasi halal</p>

14.	Pempek Labibah	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk : edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program. Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p> <p>c. Sertifikasi halal</p>
15.	Baito	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk : edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program. Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p>
16.	Rumah Asaku	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk : edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program. Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p>
17.	Fayyaza Handmade	Intensif	<p>a. Pendampingan usaha dalam bentuk : edukasi pengembangan kualitas produk, pengembangan usaha, strategi pemasaran asistensi, pemantauan, optimalisasi promosi dan pemasaran, pemantauan hasil edukasi.</p> <p>b. Pembiayaan: memberikan informasi dan menawarkan alternatif-alternatif pembiayaan kredit program. Menawarkan kemitraan, pembiayaan dan pendampingan oleh BLU DJPb.</p>

c. Rencana Kegiatan Pemberdayaan

Rencana Kegiatan

No.	Nama UMKM	Rencana Pemberdayaan
1.	Bennawa Coffe Roaster	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian Informasi Agenda Event Pameran/Promosi Produk Siap Ekspor b. Pemberian Informasi Peluang Pasar Ekspor
2.	Bunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
3.	Sale Aziz	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan NPWP, Sertifikasi Halal, NIB, PIRT, dan HAKI b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD e. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
4.	Dimsum Mbak Mecca	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
5.	Kcharis Tenun	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
6.	Cemilan One	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan NPWP, Sertifikasi Halal, NIB, PIRT, dan HAKI b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi

		<ul style="list-style-type: none"> d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD e. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
7.	Bumbu Salero Bundo	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi HAKI b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD e. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
8.	Dapoer Mbak Linda	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan NPWP, Sertifikasi Halal, PIRT, dan HAKI b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD e. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
9.	Souvenir Cek Ala	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi HAKI b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD e. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
10.	Kaldin	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
11.	Nd.Rizky'S	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD

		d. Mengikuti Sertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
12.	Ayib Handmade	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi Halal b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD e. Mengikuti Sertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
13.	Jajan Pasar Mbak Santi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan NPWP, Sertifikasi Halal, PIRT, dan HAKI b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD e. Mengikuti Sertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
14.	Pempek Labibah	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi Halal, PIRT, dan HAKI b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD e. Mengikuti Sertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
15.	Baito	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi HAKI b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD e. Mengikuti Sertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
16.	Rumah Asaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD d. Mengikuti Sertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM

17.	Fayyaza Handmade	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi HAKI dan NPWP b. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bazaar, dan promosi produk c. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi d. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD e. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
-----	------------------	--

Target Kegiatan Pemberdayaan

No.	Nama UMKM	Target Pemberdayaan
1.	Bennawa Coffe Roaster	Menjadi Eksportir Tetap dengan Pasar yang semakin Luas
2.	Bunan	Menjadi Eksportir Tetap dengan Pasar yang semakin Luas
3.	Sale Aziz	Menjadi UMKM Siap Mandiri
4.	Dimsum Mbak Mecca	Menjadi UMKM Siap Ekspor
5.	Kcharis Tenun	Menjadi UMKM Siap Ekspor
6.	Cemilan One	Menjadi UMKM Siap Mandiri
7.	Bumbu Salero Bundo	Menjadi UMKM Siap Ekspor
8.	Dapoer Mbak Linda	Menjadi UMKM Siap Ekspor
9.	Souvenir Cek Ala	Menjadi UMKM Siap Ekspor
10.	Kaldin	Menjadi Eksportir Tetap dengan Pasar yang semakin Luas
11.	Nd.Rizky'S	Menjadi UMKM Siap Ekspor
12.	Ayib Handmade	Menjadi UMKM Siap Ekspor
13.	Jajan Pasar Mbak Santi	Menjadi UMKM Siap Mandiri
14.	Pempek Labibah	Menjadi UMKM Siap Ekspor
15.	Baito	Menjadi UMKM Siap Mandiri
16.	Rumah Asaku	Menjadi UMKM Siap Ekspor
17.	Fayyaza Handmade	Menjadi UMKM Siap Mandiri

D. Kesimpulan

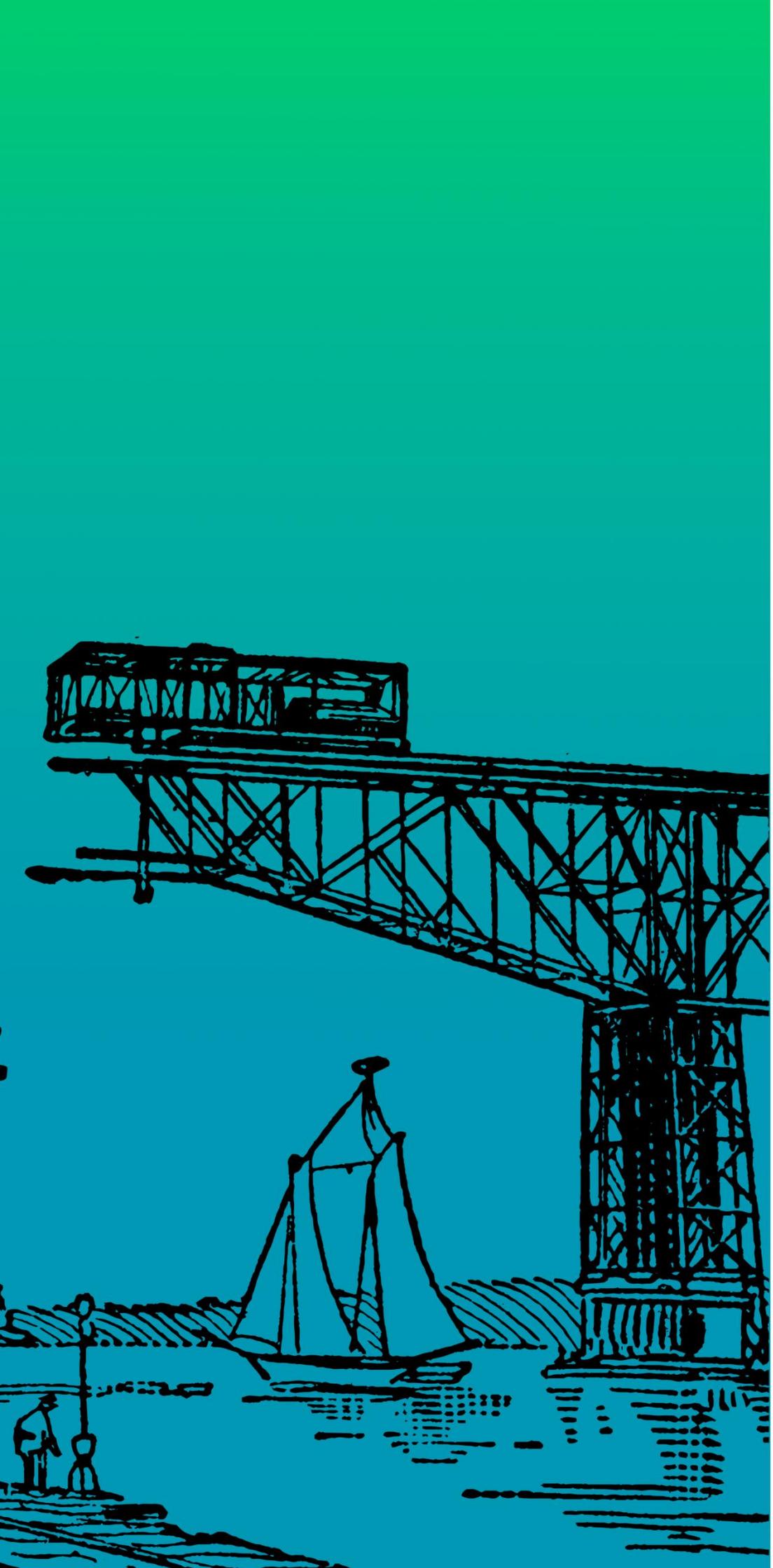
- a. Seluruh UMKM Binaan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan merupakan UMKM yang bergerak dibidang usaha Industri Pengolahan
- b. Seluruh UMKM Binaan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan merupakan UMKM dengan Skala Usaha Ultra Mikro
- c. Terdapat 17 UMKM dengan Klasifikasi: 3 UMKM termasuk dalam Klasifikasi Siap Ekspor, 11 UMKM termasuk dalam Klasifikasi UMKM Siap Mandiri dan 3 UMKM dalam Klasifikasi Rintisan
- d. 1 UMKM Siap Ekspor yang bergerak di Industri Pengolahan Kopi memerlukan Pemberdayaan yang sifatnya Insidental diberdayakan dengan memberikan informasi peluang pasar ekspor dan informasi kegiatan promosi produk siap ekspor.
- e. 3 UMKM Rintisan memerlukan Pemberdayaan Intensif dengan Kebutuhan Pemberdayaan dalam bentuk pendampingan, asistensi, pemantauan dan penguatan Inklusi Keuangan.
- f. Seluruh UMKM memerlukan Sertifikasi Halal atas Produk dan Proses Produksinya.
- g. Agenda Pemberdayaan yang diperlukan dan direncanakan terdiri dari:
 - 1. Sertifikasi halal
 - 2. Pemberian Informasi Pasar Ekspor dan Melibatkan dalam event expo atau pameran produk siap ekspor

3. Kegiatan Bazaar, dan promosi produk
4. Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran, Desain Produk, Pengembangan Kualitas Produksi
5. Kegiatan Penguatan Inklusi Keuangan TPKAD
6. Kegiatan Pelatihan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM

E. Rekomendasi

- a. Diperlukan reprofiling UMKM secara berkala sebagai langkah monitoring dan evaluasi dan validasi data UMKM Binaan yang diberdayakan
- b. Untuk Kepentingan Efisiensi dan Efektifitas pencapaian outcome Rencana Kegiatan Pemberdayaan perlu dipertimbangkan pelaksanaan pemberdayaan secara mandiri atau kolaboratif dengan stakeholder lain.
- c. Evaluasi kenaikan kelas UMKM tidak hanya pada klasifikasi: Rintisan, Siap mandiri, dan Siap Ekspor tetapi juga berdasarkan pada perubahan skala omset dan modal usaha dalam kategori UMKM: Ultra Mikro, Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Bila diperlukan dilakukan penambahan dan profiling UMKM pada Kelompok Klasifikasi Baku Bidang Usaha lain selain Industri Pengolahan.

BAB IV: ANALISIS TEMATIK



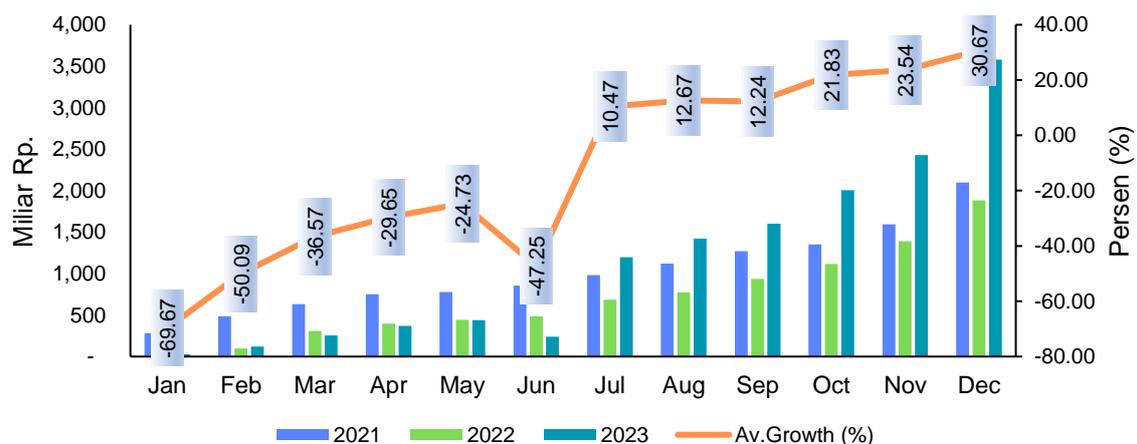
A. Perkembangan Belanja Dukungan Infrastruktur Konektivitas

Infrastruktur memiliki peran fundamental dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di suatu wilayah (Zhang & Cheng, 2023; Dissou & Didic, 2013). Semua operasi ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, bergantung pada infrastruktur yang mendukung dengan kondisi yang baik. Sebaliknya, infrastruktur yang tidak mendukung dengan kondisi kurang memadai justru dapat menghambat pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Infrastruktur dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi (Magazzino & Mele, 2021). Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dibutuhkan infrastruktur yang memadai di daerah dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta memperluas jangkauan pasar. Infrastruktur berfungsi sebagai sarana konektivitas yang dapat memperlancar arus barang, jasa, dan manusia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, mewujudkan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan dan menjaga infrastruktur

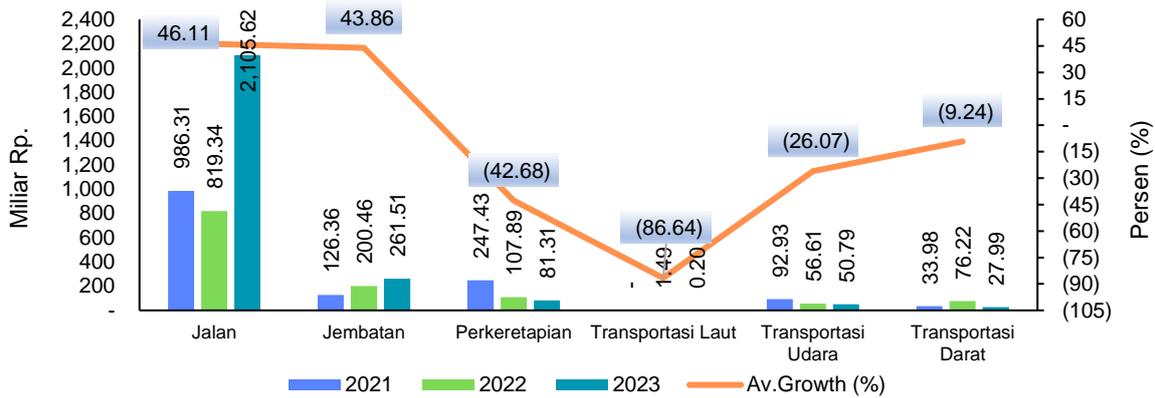
dalam kondisi yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program belanja infrastruktur. Belanja infrastruktur merupakan alokasi anggaran pemerintah yang digunakan untuk membangun, merehabilitasi, dan memelihara infrastruktur. Belanja program pemerintah di bidang infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa tren realisasi belanja program infrastruktur yang fluktuatif, selama periode 2021-2023 realisasi belanja program infrastruktur rata-rata tumbuh positif yaitu sebesar 30,67%. Belanja program infrastruktur K/L di Provinsi Sumsel menunjukkan tren peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, terlihat pada tahun 2023 realisasi belanja program infrastruktur yaitu sebesar Rp3,58 triliun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1,88 triliun pada 2022. Realisasi belanja tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur pada sektor transportasi di Sumsel, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, perkeretapiian, bandara, dan jaringan telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan konektivitas, daya saing, dan kualitas hidup masyarakat, karena Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu wilayah.

Gambar 4.1. Realisasi Belanja Program Infrastruktur K/L di Prov. Sumsel, 2021-2023



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumsel

Gambar 4.2. Realisasi Belanja Program Infrastruktur K/L Menurut Peruntukan di Prov. Sumsel, 2021-2023



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumsel

Realisasi belanja program infrastruktur menurut peruntukan Sumsel selama 2021-2023 menunjukkan tren yang cukup beragam. Selama 2021-2023 realisasi belanja infrastruktur untuk jalan rata-rata tumbuh sebesar 46.11%, belanja tahun 2023 mencapai Rp2,11 triliun, nilai tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp819 miliar pada 2022. Peningkatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dan mendorong pembangunan infrastruktur secara merata di setiap daerah. Demikian juga realisasi belanja untuk jembatan yang mengalami peningkatan dengan rata-rata tumbuh sebesar 43,86% selama 2021-2023. Pada 2023 realisasi belanja untuk jembatan sebesar Rp261,51 miliar meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp200,46 miliar pada 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan fokus pemerintah pusat pada pembangunan

konektivitas antar wilayah dalam rangka mendukung program strategis nasional.

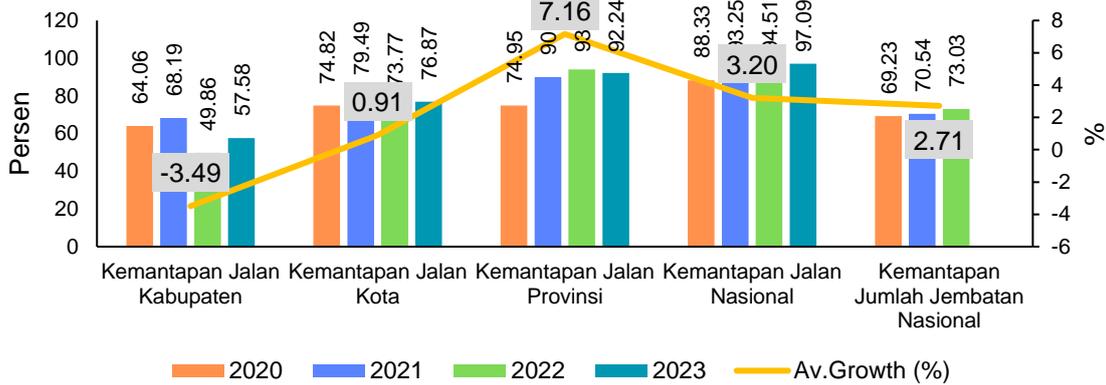
Selain itu, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat di Provinsi Sumsel yang mulai membaik mendorong peningkatan permintaan terhadap penggunaan infrastruktur jalan dan jembatan. Namun demikian, realisasi belanja infrastruktur untuk menunjang transportasi rata-rata mengalami penurunan selama 2021-2023 seperti perkeretaapian turun sebesar -42,68%, transportasi laut (-86,64%), transportasi udara (-26,07%), dan transportasi darat (-9,24%). Hal ini dapat disebabkan oleh faktor yang beragam seperti pergeseran prioritas anggaran ke sektor lainnya dan penanganan dampak sosial ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, serta masih adanya ketidakstabilan ekonomi global yang dapat menyebabkan kenaikan harga bahan baku konstruksi dan hambatan distribusi bahan baku dan peralatan konstruksi.

B. Capaian Indikator Infrastruktur Konektivitas

Oleh karena itu, analisis mendalam atas capaian indikator infrastruktur konektivitas menjadi krusial untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi potensi area yang membutuhkan peningkatan infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan serta pelayanan dasar. Komitmen pemerintah meningkatkan infrastruktur konektivitas nasional yang terlihat dari peningkatan belanja pembangunan infrastruktur yang signifikan pada 2023 sebesar Rp.3.58 triliun meningkat sebesar 90,03% dari

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.1,88 triliun pada 2022. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur konektivitas sebagai salah satu prioritas utama. Untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan infrastruktur konektivitas, pemerintah menetapkan berbagai indikator persentase kemantapan jalan. Indikator kemantapan jalan tersebut digunakan untuk mengukur tingkat konektivitas nasional dan untuk menilai efektivitas dari kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur.

Gambar 4.3. Perkembangan Indikator Kemantapan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2023



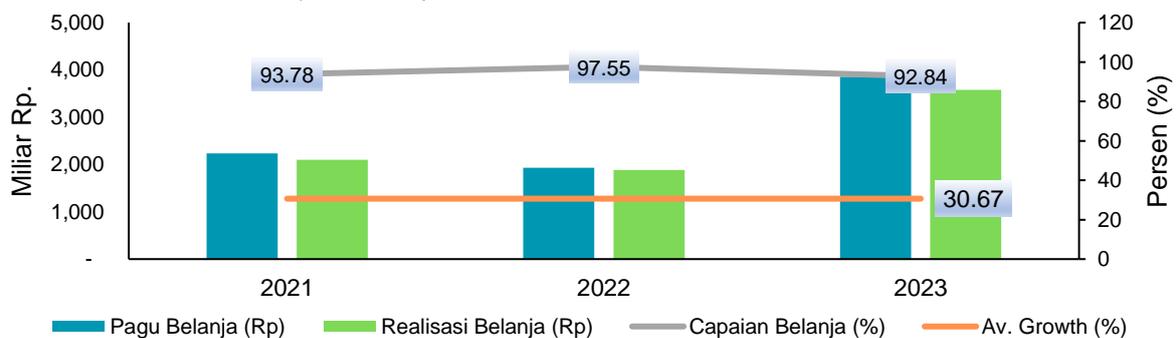
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumsel

Gambar 4.3 melaporkan capaian indikator kemantapan jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan pada 2023 yaitu sebesar 97,09% atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 94,51% pada 2022. Perkembangan kemantapan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan selama 2020-2023 ditunjukkan dengan tren yang positif pada jalan nasional rata-rata tumbuh (3,44%); jalan provinsi tumbuh (7,16%); jalan kota tumbuh (0,91%); dan jumlah jembatan nasional tumbuh (2,71%), kecuali jalan kabupaten yang rata-rata masih tumbuh negatif (-3,48). Peningkatan capaian ini disebabkan oleh faktor yang cukup beragam, seperti upaya peningkatan alokasi anggaran pemeliharaan rutin serta program rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih komprehensif dan berkala untuk jalan nasional yang kondisinya sangat memprihatinkan yang meliputi perbaikan jalan seperti penambalan lubang dan pengaspalan ulang. Beberapa faktor yang mempengaruhi indikator kemantapan infrastruktur yaitu umur jalan dan jembatan yang tua, medan jalan, struktur tanah, cuaca

ekstrem, bencana alam, beban kendaraan, pemeliharaan, dan kualitas konstruksi. Meskipun telah terjadi peningkatan, masih terdapat beberapa ruas jalan nasional dan jalan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang kondisinya masih belum baik. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu terus berupaya secara sinergi untuk meningkatkan kemantapan jalan di beberapa wilayah secara merata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

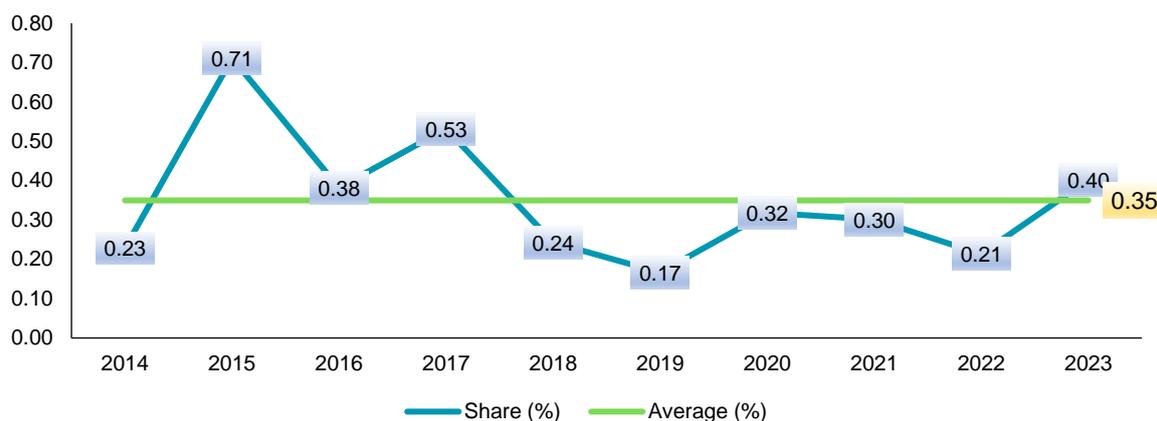
Perkembangan capaian realisasi belanja program infrastruktur konektivitas fisik mencatatkan tren yang positif selama periode 2021-2023. Secara rata-rata pertumbuhan realisasi belanja program infrastruktur konektivitas fisik mencapai 30,67% selama tiga tahun terakhir. Selanjutnya, untuk mengukur rasio efektivitas belanja dapat dilakukan dengan perbandingan antara realisasi output/outcome dengan anggaran yang dialokasikan, seperti yang disajikan pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4. Realisasi Capaian Belanja Infrastruktur Konektivitas Fisik K/L di Provinsi Sumsel, 2021-2023



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumsel

Gambar 4.5. Kontribusi Realisasi Belanja Program Infrastruktur K/L terhadap PDRB di Provinsi Sumsel, 2014-2023



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumsel

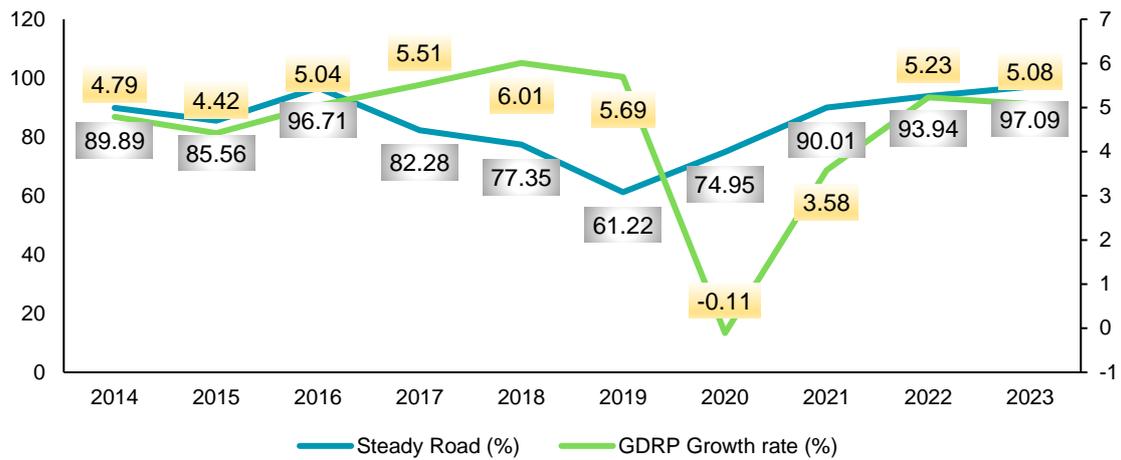
Efektivitas belanja pembangunan infrastruktur konektivitas fisik yang didominasi oleh dua Kementerian yaitu PUPR dan Perhubungan terlihat dari realisasi capaian belanja yang efektif, pada 2023 realisasi belanja total dua Kementerian tersebut mencapai 92.84%, relatif menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 97,55% pada 2022. Capaian realisasi ini masih berada antara 90% hingga 99%. Hal ini menyiratkan bahwa realisasi belanja yang relatif mendekati target yang telah ditetapkan yang berarti bahwa secara rasio capaian realisasi belanja pembangunan infrastruktur konektivitas fisik ini cukup efektif. Namun, untuk lebih memastikan pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas belanja pemerintah untuk memastikan bahwa belanja tersebut telah digunakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara empiris, terdapat hubungan yang erat antara indikator pembangunan infrastruktur dan tingkat kemiskinan di suatu negara, seperti studi yang dilakukan Miyamoto et al. (2020) mengungkap bahwa negara-negara dengan infrastruktur yang lebih baik memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, studi OECD (2017) menunjukkan Infrastruktur yang kuat dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur telah menjadi unsur penting dalam mencapai kemajuan

ekonomi. Hubungan antara keduanya terjalin erat dan saling mempengaruhi. Infrastruktur yang memadai menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi, sementara keberhasilan pembangunan ekonomi dapat mendukung pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Untuk itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung pembangunan infrastruktur konektivitas.

Gambar 4.5 melaporkan kontribusi realisasi belanja program infrastruktur Kementerian dan Lembaga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Selatan selama 2014-2023 menunjukkan tren yang berfluktuatif dengan rata-rata yaitu sebesar 0.35%, kontribusi realisasi belanja program infrastruktur Kementerian dan Lembaga terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 0.40%, ini meningkat sebesar 87,84% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0.21% pada 2022. Peningkatan realisasi belanja infrastruktur ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi, serta mendorong produktivitas sektor-sektor ekonomi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Efektivitas belanja infrastruktur dalam meningkatkan PDRB tergantung pada beberapa faktor, seperti kualitas infrastruktur yang dibangun, jenis infrastruktur yang diprioritaskan, dan lokasi pembangunan infrastruktur.

Gambar 4.6. Perkembangan Kemantapan Jalan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumsel, 2014-2023



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumsel

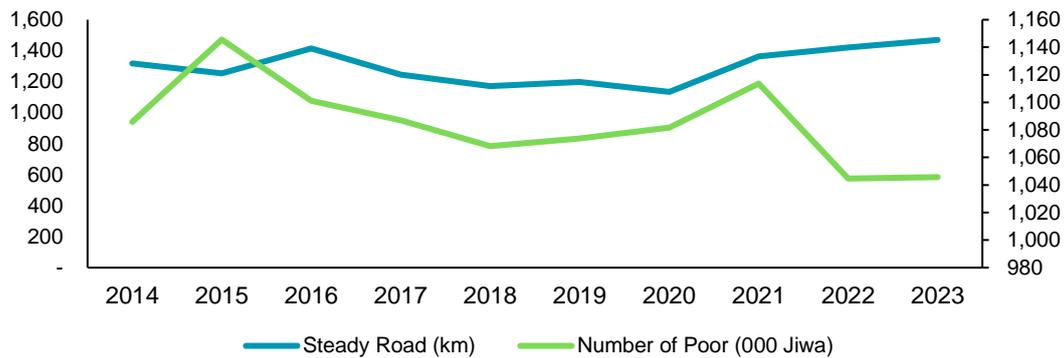
Gambar 4.6 menunjukkan perkembangan persentase kemantapan jalan dan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) dekade terakhir. Pada 2023 persentase kemantapan jalan sebesar 97,09%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 93,94% pada 2022, sementara itu, rata-rata persentase kemantapan jalan di Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai 84,90% selama periode 2014-2023. Hal ini menandakan bahwa pemerintah mampu menggunakan dana infrastruktur secara lebih efisien dan efektif, sehingga menghasilkan output yang optimal seperti kualitas jalan yang semakin baik dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan itu, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi masih tumbuh positif sebesar 4,52% selama periode 2014-2023. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 5,08%, mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,23% pada 2022. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan disebabkan berbagai faktor, antara lain seperti: (1) tidak stabilnya harga komoditas global seperti sawit, karet, dan batubara yang menjadi komoditas andalan provinsi Sumatera

Selatan; (2) pelemahan daya beli masyarakat seperti inflasi, penurunan pendapatan, dan ketidakpastian ekonomi; (3) gangguan rantai pasokan (distribusi) yang dapat menyebabkan kelangkaan barang dan jasa, dan mendorong kenaikan harga; dan (4) jaring pengaman sosial yang lemah dapat membuat masyarakat rentan terhadap dampak negatif dari inflasi, penurunan pendapatan, dan kenaikan harga barang dan jasa.

Gambar 4.7 menunjukkan perkembangan jumlah panjang jalan mantap dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan selama 2014-2023. Panjang jalan mantap menunjukkan tren yang fluktuatif, pada 2023 panjang jalan mantap mencapai 1.469,48 km, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.421,91 km pada 2022. Secara rata-rata tumbuh positif yaitu sebesar 1,22% selama periode 2014- 2023. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada 2023 mencapai 1.046 ribu jiwa, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.045 ribu jiwa pada 2022, namun secara rata-rata jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar (-0,42%) selama priode 2014-2023. Peningkatan dan penurunan jumlah penduduk miskin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, akses terhadap modal, akses layanan dasar, stabilitas politik, kualitas tata kelola pemerintah, dan kondisi geografis.

Gambar 4.7. Perkembangan Panjang Jalan Mantap (Km) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Provinsi Sumsel, 2014-2023



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumsel

C. Hubungan antara Belanja Program Infrastruktur Konektivitas Fisik dan Indikator Kemantapan Jalan/Jembatan

Hasil perhitungan korelasi pearson untuk melihat hubungan antara belanja program infrastruktur dan indikator kemantapan jalan/jembatan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0.7582 (75,82%) dengan probabilitas (p-value) sebesar 0.000 pada tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%), yang menandakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi positif yang kuat dan signifikan pada taraf 5%. Hal ini menyiratkan bahwa belanja program infrastruktur konektivitas memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan secara efektif, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dan dapat berkontribusi terhadap outcome yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi tingkat kemiskinan di Sumsel.

Tabel 4.1 menunjukkan hasil estimasi yang dilakukan untuk melihat pengaruh belanja program infrastruktur konektivitas fisik terhadap indikator kemantapan jalan/jembatan di

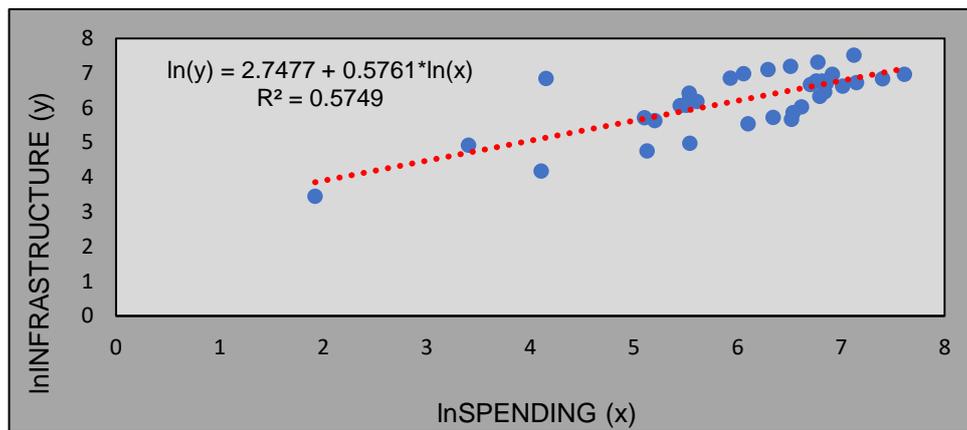
Provinsi Sumatera Selatan selama periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2023 menunjukkan bahwa belanja program infrastruktur konektivitas fisik memiliki tanda positif dan pengaruh signifikan terhadap indikator kemantapan jalan/jembatan di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini menyiratkan bahwa secara statistik adanya peningkatan 1% pada belanja program infrastruktur konektivitas fisik akan meningkatkan indikator kemantapan jalan/jembatan sebesar 0.5761%, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan (*ceteris paribus*). Hasil temuan ini mendukung dan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen (2017) dan Ziberi et al. (2022) dalam penelitian menemukan bahwa secara statistik belanja infrastruktur publik memiliki tanda positif dan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas infrastruktur fisik. Hasil estimasi yang menunjukkan hubungan linier antara belanja program infrastruktur fisik konektivitas dan indikator kemantapan jalan/jembatan di Provinsi Sumatera Selatan juga dapat dilihat pada Gambar 4.8 yang disajikan, dimana terdapat cukup bukti adanya hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut.

Tabel 4.1. Hasil Estimasi Regresi Pengaruh Belanja Program Infrastruktur Konektivitas Fisik terhadap Indikator Kemantapan Jalan/Jembatan

<i>Dependent Variable</i> = ln (INFRASTRUCTURE)				
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Constant</i>	2.7477	0.5268	5.2141	0.0000
<i>ln (SPENDING)</i>	0.5761	0.0862	6.6832	0.0000
<i>R (Correlation)</i>	0.7582			
<i>R² (Determination Coefficient)</i>	0.5749			

Sumber: Data olahan (Output EViews)

Gambar 4.8. Hubungan antara Belanja Program Infastruktur Fisik Konektivitas dan Indikator Kemantapan Jalan/Jembatan di Provinsi Sumsel



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumsel

Secara teori, terdapat hubungan yang erat antara belanja publik dan kualitas infrastruktur fisik. Belanja publik, khususnya yang dialokasikan untuk infrastruktur fisik, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Belanja publik yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik akan memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas dan tingkat kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Belanja publik dapat memberikan manfaat maksimal bagi kualitas infrastruktur fisik, sehingga diperlukan alokasi dana yang efektif dan efisien melalui tiga hal penting yaitu (1) perencanaan yang matang dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur dan mengalokasikan dana secara tepat sasaran; (2) melakukan pengawasan yang optimal terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur untuk memastikan kualitas pekerjaan dan mencegah korupsi; dan (3) melibatkan semua pihak terutama partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek

infrastruktur untuk memastikan proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

D. Hubungan antara Infrastruktur Fisik (Kemantapan Jalan/Jembatan) dan Pertumbuhan Ekonomi

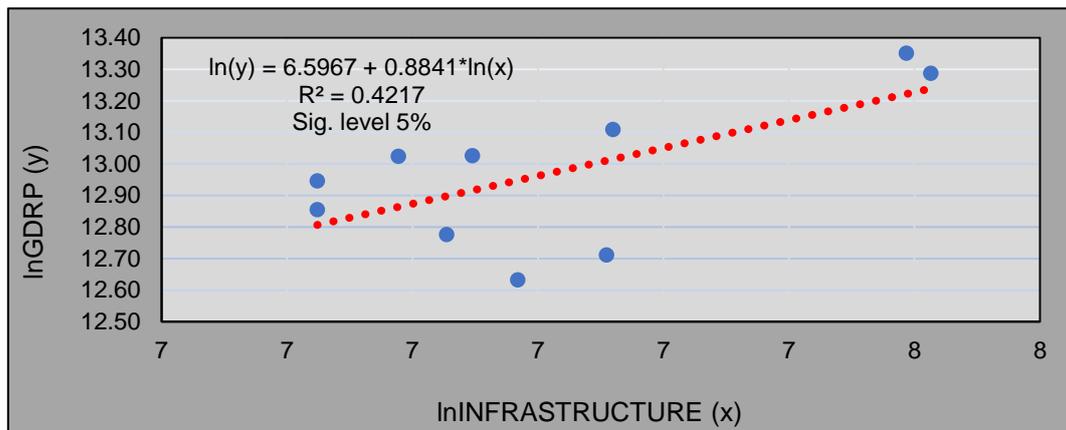
Tabel 4.2 menyajikan hasil perhitungan korelasi pearson untuk melihat hubungan antara infrastruktur (kemantapan jalan/jembatan) dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan menunjukkan nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0.6494 (64,94%) dengan probabilitas (p-value) sebesar 0.0422 pada tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%), yang menandakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi positif yang cukup kuat dan signifikan pada taraf 5%. Hal ini menyiratkan bahwa infrastruktur jalan memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan yang tepat dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.2. Hasil Estimasi Regresi Pengaruh Infrastruktur Fisik (Kemantapan Jalan/Jembatan) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

<i>Dependent Variable</i> = ln (GDRP)				
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Constant</i>	6.5967	2.6407	2.4980	0.0371
<i>ln (SPENDING)</i>	0.8841	0.3660	2.4155	0.0422
<i>R (Correlation)</i>	0.6494			
<i>R² (Determination Coefficient)</i>	0.4217			

Sumber: Data olahan (Output EViews)

Gambar 4.9. Hubungan antara Infrastruktur (Kemantapan Jalan/Jembatan) dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumsel

Tabel 4.2 menunjukkan hasil estimasi yang dilakukan untuk melihat pengaruh infrastruktur fisik (kemantapan jalan/jembatan) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2014-2023 menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki tanda positif dan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini menyiratkan bahwa apabila terjadi peningkatan 1% kemantapan jalan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.8841%, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan (*ceteris paribus*). Secara empiris, hasil ini mendukung dan sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sahoo & Dash (2012); Palei (2015); Halse (2016); Kara et al. (2016); dan Maciulyte-Sniukiene & Butkus (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa infrastruktur memiliki hubungan positif dan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis teoritis mengenai dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa dampak infrastruktur secara langsung mendorong kegiatan ekonomi untuk menghasilkan tambahan kapasitas produksi, mengurangi biaya input dalam produksi dan biaya transaksi, sementara secara tidak langsung infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas pekerja.

Hubungan linier antara infrastruktur fisik (kemantapan jalan/jembatan) dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan juga dapat dilihat pada Gambar 4.9 yang disajikan, dimana terdapat cukup bukti adanya hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut. Dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dicapai pada periode awal pekerjaan konstruksi: penciptaan lapangan kerja di bidang konstruksi dan industri terkait. Investasi di bidang infrastruktur memerlukan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah lapangan kerja yang diciptakan. Selain itu, infrastruktur juga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan, sehingga dan mendorong pertumbuhan bisnis, yang pada gilirannya menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor ekonomi. Infrastruktur merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Dengan berinvestasi dalam infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif, pemerintah dan sektor swasta juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hasil perhitungan korelasi pearson untuk melihat hubungan antara infrastruktur (kemantapan jalan) dan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan menunjukkan nilai korelasi (R) yaitu sebesar -0.6201 (-62,01%) dengan probabilitas (p-value) sebesar 0.0952 pada tingkat signifikansi sebesar 0.10 (10%), yang menandakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi negatif yang cukup kuat dan signifikan pada taraf 10%. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah. Hal ini memungkinkan

Tabel 4.3. Hasil Estimasi Regresi Pengaruh Infrastruktur (Kemantapan Jalan) terhadap Tingkat Kemiskinan

<i>Dependent Variable</i> = ln (GDRP)				
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Constant</i>	4.3073	0.7818	5.5095	0.0006
<i>(SPENDING)</i>	-0.2421	0.1083	-2.2354	0.0558
<i>R</i>	-0.6201			
<i>R²</i>	0.3845			

Sumber: Data olahan (Output EViews)

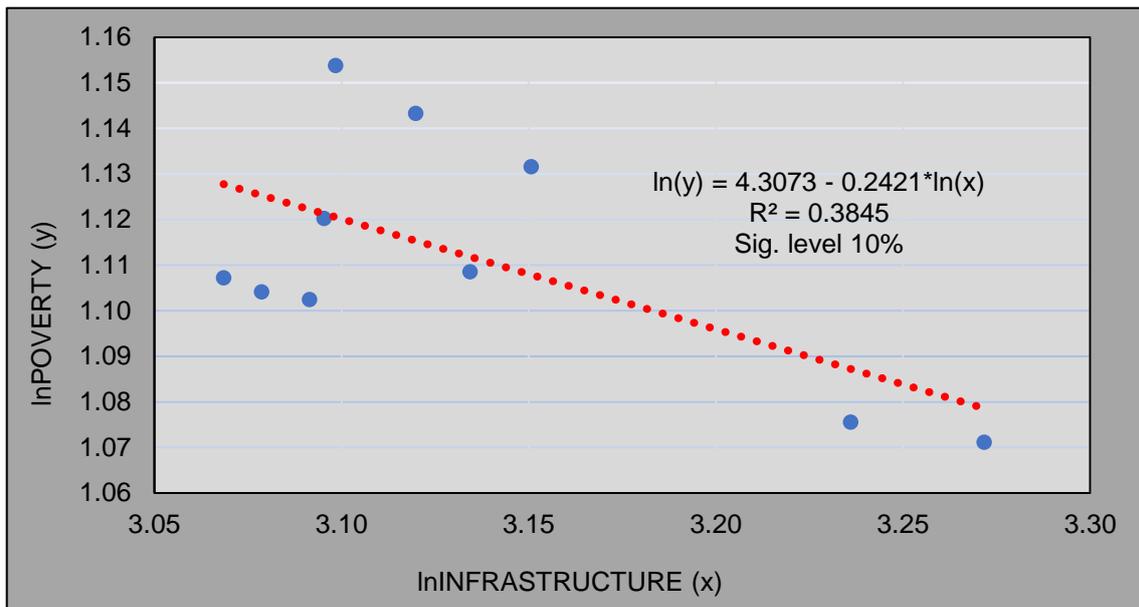
Gambar 4.8 menunjukkan hasil estimasi yang dilakukan untuk melihat pengaruh infrastruktur (kemantapan jalan) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2014-2023 menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki tanda negatif dan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini menyiratkan bahwa apabila terjadi peningkatan 1% kemantapan jalan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -0.2421%, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan (ceteris paribus). Hasil temuan ini mendukung dan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marinho et al. (2017) dan Akbar et al. (2022) dalam penelitian menemukan bahwa secara statistik infrastruktur memiliki tanda negatif dan pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Secara teori infrastruktur memiliki hubungan tidak langsung terhadap penurunan kemiskinan (Nugroho, 2015). Meskipun demikian, infrastruktur memainkan peran penting dalam pengentasan

masyarakat dengan mudah menjangkau pasar dengan lebih mudah untuk menjual hasil produk/komoditi yang dihasilkan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses peluang kerja di daerah lain, termasuk di kota-kota, serta mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur ini dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan peluang ekonomi baru, sehingga mengurangi kemiskinan.

kemiskinan dengan meningkatkan akses pasar, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, infrastruktur yang efektif harus inklusif dan didukung oleh kebijakan dan program yang tepat untuk memastikan manfaatnya dinikmati oleh semua, terutama masyarakat miskin.

Hubungan linier antara infrastruktur fisik (kemantapan jalan/jembatan) dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan juga dapat dilihat pada Gambar 4.10 yang disajikan, dimana terdapat cukup bukti adanya hubungan yang negatif antara kedua variabel tersebut. Efektivitas infrastruktur dalam mengurangi kemiskinan tergantung pada berbagai faktor, seperti jenis infrastruktur, kualitas pembangunan, dan pemanfaatan infrastruktur tersebut oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua orang, termasuk masyarakat miskin. Infrastruktur memiliki peran penting untuk memerangi kemiskinan. Secara langsung, infrastruktur dapat meningkatkan akses dan peluang pasar, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dapat membantu masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, pemerintah dan semua pihak perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara merata dan inklusif, sehingga dapat menjangkau dan memberi manfaat bagi semua masyarakat, termasuk masyarakat miskin.

Gambar 4.10. Pengaruh Infrastruktur (Kemantapan Jalan) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumsel



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumsel

Kesimpulan

1. Kinerja capaian realisasi belanja dibidang infrastruktur konektivitas cukup efektif dan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Realisasi belanja infrastruktur untuk jalan dan jembatan menunjukkan tren yang positif. Namun, realisasi belanja infrastruktur untuk transportasi secara rata-rata mengalami penurunan selama 2021-2023.
3. Perkembangan kemantapan infrastruktur fisik seperti jalan nasional, jalan provinsi; jalan kota; dan jumlah jembatan nasional di Provinsi Sumsel secara rata-rata tumbuh positif, namun untuk jalan kabupaten yang rata-rata masih tumbuh negatif selama 2021-2023.
4. Secara statistik, belanja program infrastruktur fisik memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap indikator kemantapan jalan/jembatan di Provinsi Sumsel
5. Secara statistik, infrastruktur fisik yang ditinjau dari indikator kemantapan jalan memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungan negatif dan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di

Provinsi Sumsel selama periode 2014-2023.

Rekomendasi

1. Meningkatkan investasi infrastruktur melalui (a) peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; dan (b) memfokuskan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan terdepan; (c) memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur melalui (a) perbaikan dan pemeliharaan jalan secara berkala; (b) menerapkan standar mutu yang tinggi dalam pembangunan infrastruktur; dan (c) melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
3. Memanfaatkan Infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian melalui (a) mengembangkan kawasan ekonomi khusus di sekitar infrastruktur yang baru dibangun; (b) memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal agar dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari pembangunan infrastruktur; (c) membangun infrastruktur

digital yang handal untuk mendukung kegiatan ekonomi.

4. Memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan melalui (a) meluncurkan program-program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan infrastruktur; (b) meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan; (c) memastikan pemerataan manfaat pembangunan

infrastruktur kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Pemantauan dan evaluasi melalui (a) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan; (b) melibatkan berbagai pihak dalam proses pemantauan dan evaluasi, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat.

BAB V: KESIMPULAN & REKOMENDASI



KESIMPULAN

1. Perkembangan ekonomi Sumsel sampai dengan triwulan I 2024 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan perekonomian. Namun demikian, perlu langkah strategis untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi tersebut, khususnya dari sisi konsumsi, mengingat momentum Pemilu dan Ramadhan telah berakhir di triwulan I 2024;
2. Kondisi kesejahteraan masyarakat Sumsel hingga triwulan I 2024 memperlihatkan perkembangan yang terus membaik, kecuali ketimpangan (gini ratio), khususnya di wilayah perkotaan yang mengalami peningkatan pada periode terakhir;
3. Kinerja APBN wilayah Sumsel tetap *on track* hingga triwulan I 2024. Belanja Negara tumbuh positif dipengaruhi kegiatan pemilu, pembayaran THR, pembangunan proyek strategis nasional dan percepatan pemenuhan syarat salur TKD oleh Pemda. Namun pendapatan negara mengalami kontraksi dipengaruhi peningkatan restitusi pada penerimaan pajak dan moderasi harga komoditas unggulan Sumsel;
4. Kinerja APBD tumbuh kuat dan solid di triwulan I dengan pendapatan dan belanja daerah yang mencatatkan tren positif, namun perlu merespon adanya penurunan PAD dan ketergantungan terhadap dana transfer, serta mewaspadaikan kemungkinan penurunan kinerja APBD pada triwulan berikutnya;
5. UMKM Binaan Kanwil DJPb Prov. Sumsel bergerak dibidang usaha industri pengolahan dengan skala Usaha Ultra Mikro. Dari jumlah UMKM Binaan tersebut, 3 UMKM termasuk dalam Klasifikasi Siap Ekspor, 11 UMKM termasuk dalam Klasifikasi UMKM Siap Mandiri dan 3 UMKM dalam Klasifikasi Rintisan. Seluruh UMKM tersebut memerlukan Sertifikasi Halal atas Produk dan Proses Produksinya;
6. Kinerja capaian realisasi belanja dibidang infrastruktur konektivitas secara umum cukup efektif dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika diperinci, realisasi belanja infrastruktur untuk jalan dan

jembatan menunjukkan tren yang positif. Namun, realisasi belanja infrastruktur untuk transportasi secara rata-rata mengalami penurunan selama 2021-2023;

7. Secara statistik, belanja program infrastruktur fisik memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap indikator kemantapan jalan/jembatan di Provinsi Sumsel;
8. Secara statistik, infrastruktur fisik yang ditinjau dari indikator kemantapan jalan memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungan negatif dan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

REKOMENDASI

1. Untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah Sumsel c.q. Dinas Pariwisata dan dinas terkait perlu untuk membuat event-event pariwisata yang dapat mendorong perekonomian Sumsel dari berbagai sisi. Sumsel memiliki objek wisata alam, religi, dan kuliner. Hal ini juga sejalan dengan program nasional Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
2. Untuk merespon kontraksi penerimaan negara di wilayah Sumsel, khususnya pada penerimaan pajak, Kanwil DJP Sumsel Babel perlu melakukan pengelolaan restitusi pajak sehingga tidak mempengaruhi penerimaan pajak tahun berjalan. Dengan pengelolaan restitusi yang baik diharapkan penerimaan negara dapat tumbuh positif pada periode selanjutnya. Selain itu, perlu untuk mendiversifikasi penerimaan negara sehingga muncul potensi penerimaan baru;
3. Alokasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Selatan didominasi oleh pembangunan PSN. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan oleh Kanwil DJPb Sumsel bersama KPPN atas realisasi belanja Proyek Strategis Nasional tersebut. Selain itu, terkait Transfer Ke Daerah (TKD) perlu dilakukan pendekatan kepada Pemda terkait pemenuhan syarat dokumen salur

untuk memitigasi terjadinya gagal salur yang akan berdampak kepada realisasi penyaluran TKD;

4. Optimalisasi PAD masih menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel perlu menciptakan berbagai inovasi layanan dan penggalan potensi perekonomian untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kanwil DJP Sumsel Babel dapat menjadi mitra strategis dalam mengasistensi Bapenda untuk menjalankan hal tersebut;
5. Untuk memastikan pelaksanaan pemberdayaan agar mampu meningkatkan

kelas UMKM Binaan, Kanwil DJPb Sumsel perlu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara berkala;

6. Untuk meningkatkan manfaat dari belanja di bidang infrastruktur konektivitas, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu melakukan (a) perbaikan dan pemeliharaan jalan secara berkala; (b) menerapkan standar mutu yang tinggi dalam pembangunan infrastruktur; dan (c) melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Kapten A. Rival No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135
Telp. (0711) 356534

 djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/

 @KanwilDJPbSumsel

 @DJPbSumsel

 @KanwilDJPbSumsel

